

solid & solutif

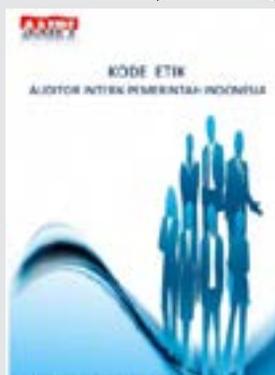
No.3 Vol.8/Desember 2018

SOLUSI

ISSN : 2088 - 0073

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

Organisasi Profesi Auditor Internal Pemerintah



AAMDes:
Karya Anak Bangsa
untuk Masyarakat Desa

Organisasi Profesi Auditor Internal Pemerintah

Para auditor di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentu tak asing dengan AAPI. Ini adalah singkatan dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, suatu organisasi profesi yang mewadahi para auditor dan lembaga APIP di seluruh Indonesia. Resmi berdiri pada 30 November 2012, keberadaan AAPI dimaksudkan untuk menjadi perekat dan pembangun sinergi jabatan fungsional yang ada di APIP, sekaligus sebagai mitra pengembangan profesionalisme dan pengembangan kapabilitas APIP.

Dalam kiprahnya mengembangkan profesionalisme auditor intern pemerintah, AAPI telah menghasilkan tiga produk utama, yakni Standar Audit, Kode Etik Auditor, dan Pedoman Telaah Sejawat. Ketiga produk itu telah menjadi acuan standar bagi para auditor dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan profesionalnya.

Untuk mengenal lebih dekat tentang organisasi profesional auditor internal pemerintah tersebut, Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini mengulas tentang AAPI yang kami angkat sebagai laporan utama. Selain laporan utama yang berkaitan dengan pengawasan, kami juga menyajikan laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini kami menampilkan salah satu produk karya anak bangsa, yaitu kendaraan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) yang akan mulai diproduksi secara massal pada tahun 2019 mendatang.

Untuk itu kami telah mewawancarai langsung sang penggagas produk karya anak bangsa tersebut, yaitu H. Sukiyat, yang adalah juga Presiden Komisaris dari perusahaan yang memproduksinya.

Dalam beberapa tahun terakhir, setiap tahunnya Kementerian PAN & RB secara rutin memberikan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada institusi atau lembaga pemerintah yang telah mencanangkan zona integritas. Pemberian penghargaan itu biasanya dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Dua tahun lalu, tepatnya pada 10 Desember 2016 salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, yaitu SMK - Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Yogyakarta memperoleh penghargaan WBK, kemudian tahun ini diusulkan untuk memperoleh penghargaan WBBM. Terkait dengan hal tersebut, dalam rubrik "Lebih Dekat dengan Auditi" kali ini, kami tampilkan profil dari SMK - SMTI Yogyakarta. Apalagi, lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian ini tergolong sekolah yang berkualitas dalam mencetak SDM industri yang kompeten dan lulusannya banyak diminati oleh para pelaku industri.

Itu adalah sebagian dari isi Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini. Tentu, masih banyak tulisan-tulisan lain yang layak dibaca. Dan akhirnya, untuk Anda semua kami ucapkan selamat membaca.

Wujudkan Kenyamanan Lingkungan Melalui Industri Hijau

SOLUSI

Majalah Pengawasan

Pelindung

Irjen (Po) Drs. Setyo Wasisto, SH
Inspektur Jenderal

Pemimpin Umum

Ir. Liliek Widodo, M.Si
Sekretaris Itjen

Dewan Pembina

Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
Inspektur IV

Pemimpin Redaksi

Drs. Singih Budiono

Dewan Redaksi

Y.L. Didid Kristiawan, ST
Edwardsyah Nurdin, BSc
Trinanti Sulamit, S.I.Kom
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

Editor

Deny Chandra, S.Kom
Hariadi Amri, SH
Noa Salfhali, ST

Desain Grafis

Arga Mahendra, SH

Fotografer

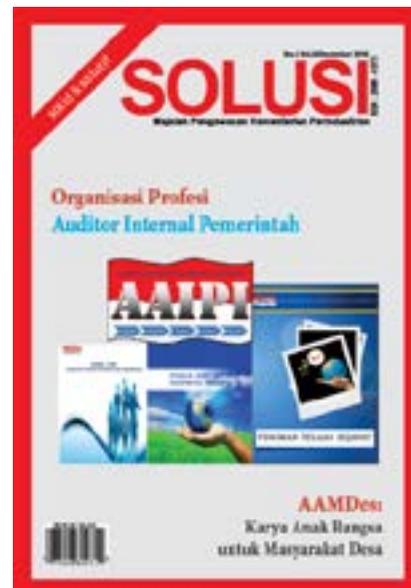
Ciendy Martha Gayatri, ST

Tenaga Sekretariat

Augus Napitupulu

Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan
Telp: 021-5251108
Email: solusi@kemenperin.go.id



Majalah Pengawasan SOLUSI
Redaksi menerima tulisan berupa opini /
saran / kritik / komentar / foto ke alamat
E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id



Diterbitkan oleh :
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



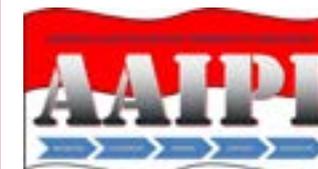
Inspektur Bicara



6

**Ketika Inspektorat Jenderal
Melakukan Pengawasan**

Aktual



8

**Mengenal AAPI:
Organisasi Profesi
Auditor Internal Pemerintah**

Kabar Industri



23

**AMMDes:
Karya Anak Bangsa
untuk Masyarakat Desa**

Telaah



33

**Pelayan Publik Bergaya Entrepreneur:
Cara Efektif Melakukan
Pengawasan Pengadaan**

Lebih Dekat Dengan Auditi



37

**SMK - SMTI Yogyakarta:
Setelah Pencanaan
Zona Integritas**

Telaah



42

**Reformasi Birokrasi
Belum Optimal**



Ketika Inspektorat Jenderal Melakukan Pengawasan

Oleh : Pranata
Inspektur III pada Inspektorat Jenderal
Kemenperin

Ketika melantik Inspektur Jenderal (Pol) Drs. Setyo Wasisto, SH sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian pada 15 November lalu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam sambutannya menyatakan, "Inspektur Jenderal adalah jabatan yang strategis di lingkungan Kemenperin. Tidak hanya bertugas menyelenggarakan fungsi pengawasan, tetapi juga melakukan pengawasan program dan kegiatan sektor perindustrian."

Apa yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian tersebut sudah sepatutnya disimak oleh para auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin. Tentu saja pengawasan yang dimaksud adalah terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Paradigma pengawasan yang dilakukan oleh APIP tidak lagi dengan pendekatan *watchdog* yang lebih berorientasi mencari kesalahan dan menghukum, tanpa memberikan solusi. Saat ini paradigma pengawasan lebih berorientasi kepada pendekatan *counseling partners* dan *catalis*.

Dengan paradigma baru pengawasan tersebut maka pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan *assurance* dan *consulting* yang memastikan tujuan organisasi beserta program dan kegiatan dapat tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis. Dalam melaksanakan pengawasan, auditor diharapkan dapat

menjadi mata dan telinga dari top management ataupun pimpinan instansi pemerintah; serta dapat memberikan *early warning system* sebelum terjadinya penyimpangan. Terkait dengan paradigma baru pengawasan maka ukuran keberhasilan APIP bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen mengatasi permasalahan yang timbul serta sejauh mungkin mencegah terjadinya penyimpangan dan meminimalisir terjadinya risiko.

Sesuai dengan paradigma baru pengawasan, beberapa tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dapat difungsikan sebagai bentuk "pengawasan". Tentu saja pengertian pengawasan tersebut bukanlah dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau penjagaan terhadap praktik-praktik curang (*fraud*), melainkan upaya menjaga agar program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh entitas yang diawasi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko yang merugikan.

Bentuk-bentuk tugas dan kegiatan Inspektorat Jenderal yang dapat difungsikan sebagai pengawasan dapat berupa *reviu rencana kerja dan anggaran (RKA)*, *monitoring dan evaluasi (monev)*, *probity audit*, Sistem Pengendalian Intern (SPIP), *advokasi*, *pendampingan*, dan sebagainya. *Reviu RKA* sejatinya dimaksudkan agar auditor dapat menelaah

aspek perencanaan dari suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat dipastikan bahwa program atau kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tugas dan fungsi entitas, dapat memberikan manfaat, dan jumlah anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan maksud memperoleh informasi yang memadai dari perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, untuk dievaluasi apakah telah berjalan sesuai rencana serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila dipandang perlu. Demikian pula dengan *probity audit*, yang merupakan bentuk pengawasan proses pengadaan barang/jasa agar tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara. Sementara untuk menghindari kemungkinan terjadinya risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan, bentuk pengawalannya dilakukan melalui *pendampingan pelaksanaan program/kegiatan dan evaluasi peta risiko* audit.

Berbagai bentuk pengawasan tersebut tentu saja tidak mengesampingkan tugas utama Inspektorat Jenderal dalam bentuk *post-audit* yang berupa audit kinerja, audit ketaatan, audit dengan tujuan tertentu, maupun audit lainnya.

Pengawasan program dan kegiatan sektor perindustrian sebagaimana diharapkan Menteri Perindustrian tentunya ditujukan kepada sektor prioritas, seperti penguatan SDM industri, pendalaman struktur industri, pengembangan industri padat karya yang berorientasi ekspor, pengembangan industri kecil dan menengah melalui platform digital, industri berbasis SDA, dan pengembangan wilayah industri. Demikian pula dengan program implementasi Making Indonesia 4.0. perlu juga dilakukan pengawasan mengingat kesuksesan dari program tersebut akan mampu mendorong pertumbuhan PDB sebesar 1-2 persen per tahun.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tentu tidak dimaksudkan untuk ikut campur terlalu jauh terhadap gerak langkah dari satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan program atau kegiatannya. Pengawasan dilakukan sebatas sebagai *counseling partners* dari pelaksana program/kegiatan, dengan memberikan saran dan rekomendasi yang dapat menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

Bagaimanapun, keberhasilan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dapat tercapai jika didukung oleh tenaga-tenaga auditor yang handal, kompeten dan profesional. Termasuk juga komitmen dari mitra yang dikawal dalam menyikapi rekomendasi yang diberikan oleh auditor sebagai kepanjangan tangan dari Inspektur Jenderal.

Kami berharap, semoga dengan komitmen yang kuat dari aparat pengawasan internal dalam memaksimalkan seluruh fungsi-fungsi pengawasan dapat memprioritaskan pengawasan yang bersifat preventif, maka akan terhindar dari kesalahan dan penyimpangan sedini mungkin dari para auditor dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian profesi auditor akan diakui, dipercaya dan dapat memberikan nilai tambah bagi pihak lain.

Terlebih dengan hadirnya Bapak Irjen (Pol) Drs. Setyo Wasisto, SH sebagai Inspektur Jenderal Kemenperin yang berlatarbelakang kepolisian, dapat menjadi tempat berguru bagi para auditor untuk menambah wawasan baru, utamanya dalam bidang intelijen dan investigasi serta pemecahan masalah. Di sisi lain, kehadiran beliau juga dapat memberikan semangat, energi dan motivasi baru bagi kita semua untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan lebih baik lagi.



Mengenal AAIPI: Organisasi Profesi Auditor Internal Pemerintah

Sejatinya, auditor adalah jabatan profesional. Itu berarti, pemangku jabatan tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya haruslah bersikap profesional, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Pada sisi lain, orang-orang yang bekerja dalam lingkungan profesional memerlukan wadah organisasi yang independen dan terpercaya. Khusus untuk auditor internal pemerintah, wadah organisasi itu bernama Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Kelahiran AAIPI tidak terlepas dari kegiatan Tim Kecil Pembentukan Organisasi Profesi beberapa bulan sebelumnya. Kemudian, pada 30 November 2012 melalui suatu rapat pleno di Aula Gandhi, Kantor BPKP Pusat, Jakarta, secara resmi AAIPI disahkan pembentukannya.

Wakil Menteri PAN & RB yang ketika itu dijabat oleh Eko Prasjojo dalam sambutannya menyatakan, lahirnya AAIPI merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi di bidang

pengawasan. Sementara Kepala BPKP (saat itu) Mardiasmo dalam sambutan tertulisnya berharap, agar organisasi profesi auditor internal pemerintah ini betul-betul dapat menjadi perekat dan pembangun sinergi jabatan fungsional yang ada di APIP, sekaligus sebagai mitra pengembangan profesionalisme dan pengembangan kapabilitas APIP.

Organisasi Profesi

Organisasi profesi ini memiliki anggota baik perorangan dan unit kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Yang termasuk dalam unit kerja APIP merupakan instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal/Inspektorat pada Unit Pengawasan Intern Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Inspektorat/Unit

Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara; Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota; dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan terbentuknya AAIPI, maka Forum Bersama (Forbes) APIP Pusat dan Daerah serta organisasi APIP dengan nama lain meleburkan diri dan menjadi anggota AAIPI. Kehadiran AAIPI memang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme auditor melalui keaktifan/peran serta dalam kegiatan pengembangan profesi. Pembentukan AAIPI sendiri merupakan pelaksanaan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 52 ayat 3, Pasal 53 ayat 3, dan Pasal 55 ayat 2. Diharapkan dengan adanya AAIPI maka akan dapat digunakan sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalisme auditor pemerintah; berkontribusi pada pemberian masukan kegiatan Pembina Jabatan Fungsional Auditor dalam mengembangkan profesi auditor anggota AAIPI; serta menyamakan persepsi yang berhubungan dengan profesi auditor di bidang pengawasan intern pemerintah. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah mengingat anggota AAIPI saat ini tersebar pada 86 unit kerja di tingkat pusat dan 543 di tingkat daerah dengan jumlah anggota individu berjumlah sekitar 13.000 orang.

Isu Strategis

Sebagai organisasi profesi yang merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, terdapat beberapa isu strategis yang dihadapi oleh AAIPI. Isu strategis itu, *pertama*, penguatan organisasi AAIPI. Dalam hal ini AAIPI berperan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas auditor, menjaga obyektivitas dan independensi yang dilandasi dengan profesionalisme, pengembangan secara berkelanjutan atas perangkat profesi dalam peningkatan kapabilitas APIP misalnya dengan pembuatan standar audit, kode etik auditor, dan pedoman telaah sejawat.

Isu strategis kedua, kemampuan AAIPI dalam beradaptasi dengan dinamika dan pengembangan lingkungan strategis dalam pengawasan intern pemerintah. Dalam hal ini dilakukan dengan pengembangan berkelanjutan kapasitas APIP yang mengacu pada praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.

Ketiga, AAIPI diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pembangunan nasional dengan cara memberikan kontribusi pengawalan program dan kebijakan pemerintah, mendukung penyelenggaraan pemerintahan agar terhindar dari praktik-praktik curang

“

Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan.

-Colin Powell



seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), membantu upaya penyerapan anggaran secara akuntabel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mencegah para pengambil kebijakan melakukan kesalahan, misalnya kesalahan-kesalahan yang terkait dengan realisasi anggaran.

Selanjutnya, keempat, selalu beradaptasi dengan era informasi digital yang menyebabkan perubahan pengaruh mendasar bagi pelaksanaan maupun pengembangan auditor internal pemerintah.

Selain isu-isu strategis di atas, berdasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015-2019 diharapkan fokus pengawasan di lingkungan pemerintah tidak hanya terpaku pada aspek pengelolaan keuangan negara (misalnya dengan audit kepatuhan/ketaatan pada peraturan perundangan), namun secara bertahap menuju pada pengawasan kinerja. Hal lain yang juga memerlukan perhatian terutama pada permasalahan-

permasalahan yang belum juga selesai, misalnya tumpang tindih peraturan/kebijakan pengawasan, independensi, kapasitas, kuantitas dan kapabilitas APIP yang belum sepenuhnya memadai. Demikian pula dalam hal belum sinerginya pengawasan internal, pengawasan eksternal, serta aparat penegak hukum yang belum optimal, dan pengawasan dari masyarakat yang belum diakomodasi secara efektif. Ditambah lagi perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja yang tentunya memerlukan peningkatan peran yang makin efektif dari auditor internal.

Secara organisasi, saat ini AAPI telah berhasil merumuskan dan membangun beberapa perangkat keprofesionalan auditor internal pemerintah, antara lain berupa Standar Audit, Pedoman Telaah Sejawat, dan Kode Etik Auditor. Sementara itu, beberapa waktu lalu, tepatnya pada 27 November 2018, AAPI juga telah menyelenggarakan Kongres AAPI Tahun 2018. Kongres ini diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) yang

dihadiri oleh 350 peserta yang berasal baik dari DPN maupun Perwakilan Pengurus Wilayah. Kongres ini menjadi penting karena terdapat agenda pemilihan dan pengangkatan DPN Periode 2018-2021, mengingat telah berakhirnya kepengurusan periode 2015-2018. Berdasar hasil musyawarah, Ketua Umum AAPI, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan terpilih kembali menjadi Ketua AAPI tahun 2018-2021 dengan Inspektur Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai Wakil Ketua I dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua II.

Dengan kepengurusan baru tersebut, tentunya diharapkan dapat melanjutkan dan meningkatkan capaian-capaian dari kepengurusan sebelumnya. Ke depan AAPI diharapkan dapat membangun APIP di Indonesia sebagai pengawal pembangunan negara, membawa APIP semakin jaya, dan profesional dalam mengemban tugas. Sinergi berbagai program yang sudah dibangun bersama tentunya harus terus ditingkatkan, termasuk pengembangan kapasitas SDM APIP, baik *hard competency* maupun *soft competency*,

agar auditor benar-benar bisa menjadi *trusted advisor* yang dapat memberikan masukan strategis untuk kepentingan yang lebih luas bagi kementerian/lembaga maupun institusi pemerintah daerah tempatnya ditugaskan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang juga merupakan anggota AAPI tentunya akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan AAPI dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM APIP terutama bagi para auditor. Setelah sebelumnya dipercaya oleh Komite Telaah Sejawat untuk melaksanakan dua telaah sejawat APIP di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Sekretariat Negara, diharapkan ke depannya Inspektorat Jenderal Kementerian akan mampu mendukung kegiatan-kegiatan AAPI yang lain, dan bersinergi dengan APIP dari kementerian/lembaga lain, serta komite-komite lain yang ada di AAPI, misalnya Komite Kode Etik, Komite Standar Audit, maupun Komite Pengembangan Profesi.

Semoga harapan itu dapat terwujud.
(Dyan Garneta PS)



Amplop Coklat

Oleh : *Edwardsyah Nurdin*
Redaktur Majalah Pengawasan SOLUSI

Beberapa waktu lalu, saya membaca tulisan di Surat kabar Kompas yang mengupas tentang amplop coklat di kalangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di bawah judul "DPR Pengumpul Amplop Coklat" (KOMPAS, 11/10/2018), tulisan tersebut mengupas kebiasaan para anggota DPR mengumpulkan sisa uang dari berbagai aktivitas yang dijalannya. Dengan nada berguyon, kebiasaan itu disebut sebagai "pengumpul amplop coklat". Pengumpul amplop coklat mengacu kepada anggota DPR yang memilih penambahan penghasilan dari jatah fasilitas sebagai anggota DPR, seperti tunjangan kedewanan, dana reses, kunjungan kerja, atau sosialisasi empat pilar MPR; yang umumnya berupa perjalanan dinas. Istilah amplop coklat boleh jadi karena dana untuk perjalanan dinas tersebut dimasukkan dalam amplop berwarna coklat.

Khusus yang berkaitan dengan perjalanan dinas, dana yang tersedia dalam amplop coklat lumayan besar. Untuk kegiatan reses, seorang anggota bisa memperoleh 4 - 5 kali reses setiap tahunnya, dengan jumlah dana diterima Rp 150 juta setiap kali kunjungan reses. Dana serap aspirasi sebesar Rp 105 juta per-tahun. Dana sosialisasi empat pilar per-kegiatan berjumlah Rp 50 juta; dalam setahun seorang anggota bisa mengikuti

4 - 5 kali kegiatan. Kemudian dana dengan pendapat dengan masyarakat jumlah yang diterima berkisar Rp 18 juta sampai Rp 20 juta per-kegiatan, dan dalam setahun ada tiga kegiatan untuk itu. Ditambah lagi dengan perjalanan dinas lainnya, seperti kunjungan kerja baik di dalam maupun ke luar negeri.

Jumlah dana untuk pembiayaan perjalanan dinas anggota DPR bersifat lumsum. Artinya, uang diberikan sekaligus di awal dan tidak harus disertai bukti pengeluaran, seperti tiket pesawat, kwitansi hotel dan sebagainya. Artinya, jika ada sisa anggaran, kelebihan tersebut tak perlu dikembalikan ke kas negara.

Membaca tulisan tersebut sontak saja ingatan saya kembali ke masa lalu, yakni ketika para pegawai negeri (PNS) dalam melaksanakan perjalanan dinas memperoleh pembiayaan yang bersifat lumsum. Artinya, sama seperti yang sekarang dinikmati oleh para wakil rakyat di Senayan. Yang membedakan hanya pada jumlah nilai satuan biaya: untuk PNS pastilah lebih kecil dibandingkan untuk wakil rakyat.

Tapi walaupun nilainya lebih kecil, para PNS umumnya sangat menanti mendapatkan Surat Perjalanan Dinas (SPD). Kenapa? Ya, karena itu tadi: kita bisa memperoleh selisih pengeluaran riil dengan pembiayaan yang bersifat

lumsum tersebut. Tentu saja, untuk itu kita harus pandai-pandai berhemat atau bertindak efisien. Misalnya, untuk biaya transportasi besarnya mengacu kepada harga tiket pesawat, dalam hal ini "Garuda". Itu bisa kita alihkan dengan menggunakan kereta api, bus antar kota, atau kapal laut; dan dari sana kita akan memperoleh selisih harga yang lumayan besarnya. Demikian pula untuk biaya penginapan yang besarnya mengacu kepada tarif hotel "berbintang". Untuk itu kita bisa berhemat dengan menginap di hotel kelas "melati", atau kalau ada famili di kota tujuan, kan tak ada salahnya menginap di rumah famili.

Kelebihan dari sisa perjalanan dinas tersebut tentulah sesuatu yang sangat didambakan bagi para PNS. Apalagi ketika itu, gaji PNS boleh dibilang pas-pasan, bahkan boleh dibilang tergolong kurang. Ketika itu belum ada yang namanya tunjangan kinerja yang jumlahnya mendekati, bahkan ada yang beberapa kali lipat dari gaji bulanan yang diterima.

Sedemikian didambakannya memperoleh SPD, maka banyak yang iri terhadap auditor. Kenapa? Karena di antara sekian banyak jabatan, hanya para auditor yang paling sering mendapatkan SPD sehubungan dengan tugas jabatannya. Pekerjaan melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap unit-unit kerja yang tersebar di berbagai daerah, menyebabkan para auditor sering melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah. Apalagi jumlah hari pelaksanaan pengawasan relatif lebih banyak dibanding tugas jabatan lainnya. Rata-rata seorang auditor bisa memperoleh SPPD dua atau tiga kali dalam sebulan, dengan jumlah hari penugasan bisa mencapai 15 sampai 20 hari. Sementara PNS yang lain hanya sekali-sekali saja diberi kesempatan memperoleh SPD; itu pun dengan jumlah hari yang terbatas.

Banyaknya perolehan SPD membuat penghasilan auditor tergolong nyaman karena dapat mendongkrak gaji bulanan yang pas-pasan itu. Bayangkan, selesai melaksanakan tugas perjalanan dinas, jika kita bisa berhemat maka dapat membawa pulang separuh dari biaya perjalanan dinas tersebut. Dan perolehan itu sah-sah saja sebagai tambahan penghasilan, yang karena sifatnya lumsum tidak perlu dikembalikan ke Kas Negara.

Tapi itu cerita dulu; cerita ketika biaya perjalanan dinas bagi PNS masih bersifat lumsum. Namun, sejak diberlakukannya biaya perjalanan dinas yang mengacu pada sistem "at-cost" yang dimulai pada tahun 2008 lalu, memperoleh SPD ternyata bukan hal yang didambakan lagi. Kenapa demikian? Karena kelebihan yang bisa diperoleh dari biaya SPD relatif kecil: hanya berharap kelebihan dari uang harian yang sifatnya masih lumsum. Sedangkan uang transport, biaya penginapan, atau sewa kendaraan, jika masih ada kelebihan harus dikembalikan ke kas negara karena bersifat "at-cost".

Kelebihan dari amplop coklat yang berisi biaya perjalanan dinas bagi para PNS tinggal cerita kenangan indah. Apakah hal demikian juga akan dirasakan oleh para wakil rakyat di Senayan?

“

Namun, sejak diberlakukannya biaya perjalanan dinas yang mengacu pada sistem "at-cost" yang dimulai pada tahun 2008 lalu, memperoleh SPD ternyata bukan hal yang didambakan lagi.



Praktik Pungli, Hasil Test Seleksi Penerimaan CPNS, dan Survei Penilaian Integritas

Satuan Tugas Sapu Besih Pungutan Liar atau lebih dikenal dengan istilah Satgas Saber Pungli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2016 pada 20 Oktober 2016, hingga 15 Oktober 2018 berhasil menangkap 12.146 orang yang terlibat pungli dan menyita barang bukti senilai Rp 320,38 miliar. Namun hampir separuh dari kasus tersebut hanya dikenai sanksi administrasi, tidak diproses hukum pidana. Selanjutnya diinformasikan, selama periode tersebut Satgas Saber Pungli telah menerima 36.127 aduan pungli. Pelayanan publik adalah yang paling banyak diadakan terjadinya pungli (52 persen), disusul sektor pendidikan (20 persen), hukum (8 persen), perizinan (5 persen), kepegawaian (5 persen), serta pengadaan barang/jasa (5 persen).

Sekretaris Satgas Saber Pungli Inspektur Jenderal Widiyanto Poesoko mengatakan, sikap permisif pada praktik pungli mengancam integritas birokrasi dalam pemberantasan korupsi. "Pungli harus cepat diberantas agar tidak berkembang lebih jauh menjadi budaya korupsi di birokrasi," ujar Widiyanto di

Jakarta, 23 Oktober lalu. Selanjutnya Widiyanto menyatakan, sejumlah perkara yang tidak diproses hukum karena tidak sebanding dengan nilai pungutan liarnya. Oleh karena itu, dia menghimbau kepada masing-masing instansi untuk memberi sanksi tegas kepada pegawainya yang tertangkap terlibat pungli (Kompas, 24/10/2018).

Salah satu sektor pelayanan publik yang dijadikan sumber pungli dan korupsi di birokrasi adalah yang terkait dengan perizinan. Menyoroti hal tersebut, Surat kabar KOMPAS dalam terbitannya 8 November 2018 memaparkan masalah perizinan menjadi salah satu penyebab yang membuat kepala daerah dan sejumlah birokrat diproses hukum karena korupsi; yang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum optimal (Kompas, 8/11/2018).

Terobosan dibutuhkan untuk mengoptimalkan reformasi birokrasi. Guna mewujudkan birokrasi yang cepat, bersih dan inovatif, dibutuhkan penggabungan antara orientasi hasil dan prosedur. Orientasi hasil yang

banyak dianut pengusaha membuat mereka berharap perizinan dilakukan dengan cepat. Sementara birokrasi yang berorientasi pada prosedur, berpendapat harus ada tahapan untuk mengeluarkan izin. Perbedaan kedua orientasi tersebut sering kali berujung pada praktik korupsi dan pungli.

Terkait dengan perbedaan kedua orientasi tersebut, ketika membuka *The International Public Service Forum* 2018 di Jakarta, 7 November lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan: "Dengan menyinergikan dua orientasi ini, upaya perbaikan pelayanan bisa terwujud, birokrasi menjadi lebih efisien dan bersih. Mengapa terjadi banyak kasus di KPK, karena perbedaan sikap antara pengusaha dan birokrasi".

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan, reformasi birokrasi memang belum berjalan sempurna. Hal ini terutama setelah melihat banyaknya temuan Saber Pungli. Selanjutnya ditegaskan, pentingnya bagi birokrasi tetap menjaga komitmen bersih dari korupsi. "Harus tetap ada pencegahan, penindakan jika yang kita inginkan adalah kemajuan," ujarnya.

Pada bagian lain, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Eko Prasodjo menjelaskan, relasi birokrasi dan swasta sangat tergantung pada struktur dan kultur dalam birokrasi itu sendiri. Kalau struktur dan kultur dalam birokrasi sudah terbentuk, swasta akan mengikuti.

Terkait dengan reformasi birokrasi, setidaknya ada tiga masalah yang dihadapi, yakni: kultur budaya anti korupsi yang belum mengakar hingga ke daerah, relasi dalam birokrasi yang kerap diintervensi politik, dan belum ada keberlanjutan program inovasi dari setiap kepala daerah.

Sementara itu secara terpisah, Wakil Ketua KPK M. Syarif berharap semua pihak, termasuk sektor swasta, menjalankan bisnis secara berintegritas dan mengikuti peraturan yang ada dalam mengurus semua perizinan dengan menghindari praktik suap. Perilaku suap dari pihak swasta ini juga berkelindan dengan birokrasi perizinan yang rumit dan memakan waktu lama.

Hal yang perlu digarisbawahi dari kenyataan masih maraknya perilaku pungli tersebut, adalah pentingnya peran APIP dan pimpinan instansi untuk menindak dan memberi sanksi yang tegas terhadap aparat yang terlibat pungli. Boleh jadi nilai yang dipungli tidak seberapa, namun jika dilakukan terus menerus karena tidak dikenakan sanksi yang keras dan tegas, dampaknya jelas akan menyuburkan budaya korupsi yang kian meluas.

Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah berkaitan dengan kebutuhan birokrasi pelayanan publik yang berkualitas di tengah kompetisi global yang tengah berlangsung dewasa ini. Tahun ini pemerintah kembali melaksanakan rekrutmen CPNS untuk mengisi kebutuhan 238.015 formasi jabatan di seluruh Indonesia, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui rekrutmen tersebut diharapkan diperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif.

Proses seleksi penerimaan CPNS telah berlangsung sejak akhir Oktober lalu. Sampai dengan 14 November 2018, berdasarkan data sementara Badan Kepegawaian Negara (BKN), setidaknya data yang sudah masuk sekitar 2,096 juta peserta dari 2,8 juta peserta yang mengikuti test seleksi kompetensi dasar (SKD). Data itu terbagi menjadi empat wilayah, yakni wilayah timur, tengah, barat dan pusat (kementerian/lembaga).

Dari data yang masuk, persentase kelulusan terkecil ada di wilayah timur (1,44 persen), kemudian wilayah tengah (2,18 persen), barat (8,32 persen), dan pusat (13,69 persen). Persentase kelulusan itu sangat jauh dari harapan apabila melihat kuota formasi yang dibutuhkan sehingga ada formasi terancam tidak terpenuhi. Dalam situasi itu, pemerintah menyiapkan kebijakan khusus bagi mereka yang tidak lolos SKD.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Djaweng mengatakan, kualitas birokrasi bisa turun apabila pemerintah membuka kesempatan bagi mereka yang tidak lolos SKD. Pemerintah harus konsisten mengikuti standar kompetensi yang ditetapkan demi kualitas birokrasi.

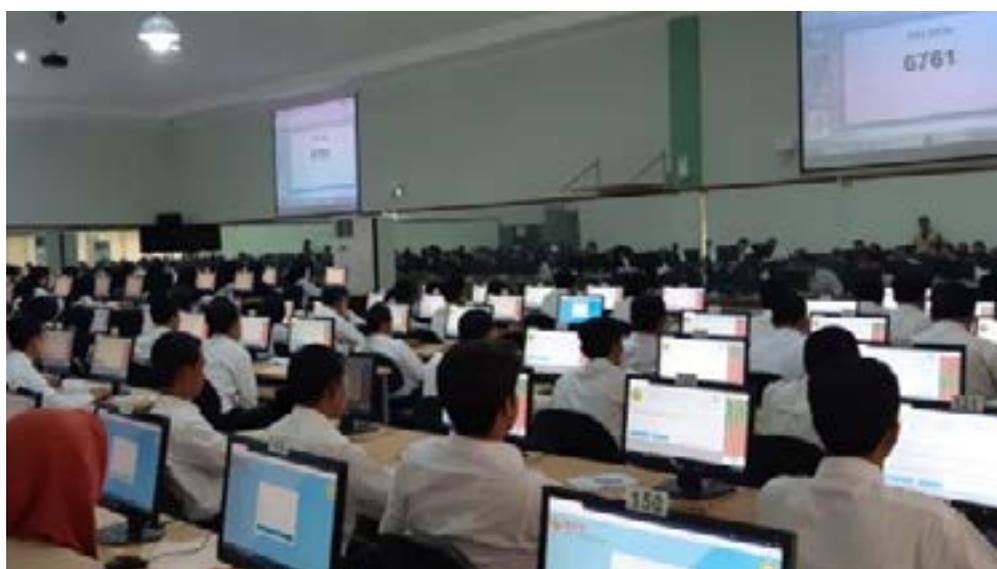
“Jadi kalau gagal, ya gagal saja, karena banyak pertarungan ke depan kalau pemerintah masih berkompromi terhadap pelamar yang tidak lolos seleksi. Kalau kita masih berkompromi dengan kualitas input yang buruk, nanti

kualitas pelayanannya buruk, birokrasi ikut buruk,” ujar Robert di Jakarta, 14 November lalu (Kompas, 15/11/2018).

Hal senada diungkapkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro. Ari Kuncoro menyatakan, penerapan kebijakan khusus bagi mereka yang tak lolos SKD sangat berisiko bagi reformasi birokrasi yang digalakkan pemerintah saat ini. Apalagi tantangan aparatur sipil negara ke depan kian besar di era persaingan global.

“Kalau hanya asal memenuhi kuota, yang masuk pun jadi di bawah standar. Padahal yang dibutuhkan saat ini mereka yang kompetitif, inovatif, harus menuju *smart government*, lebih melayani masyarakat, dan harus mencari solusi. Itu membutuhkan kualitas birokrasi yang jauh lebih baik. Jangan nanti malah menjadi hambatan,” ujar Ari.

Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi, pun tidak sepakat jika pemerintah langsung memberikan kebijakan khusus bagi mereka yang



gagal dalam test SKD. Penerapan kebijakan khusus itu akan menimbulkan ketidakadilan antarpeserta.

Sementara Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Eko Prasodjo menilai pemerintah perlu melihat persoalan rendahnya tingkat kelulusan secara komprehensif. “Salah satu penyebabnya adalah tingkat kesulitan soal tentang kepribadian. Mungkin tidak diujicoba terlebih dahulu pada saat ditetapkan sebagai soal ujian dalam CAT (*computer assistant test*). Ada masalah dalam validitas dan rehabilitas soal,” ujar Eko (Kompas, 16/11/2018).

Namun akhirnya pemerintah menetapkan kelulusan CPNS ditentukan berdasarkan ranking, tak lagi mengindahkan batas passing grade. Menteri PAN & RB Syafrudin mengumumkan hal tersebut di Istana Kepresidenan, Bogor pada 21 November lalu dan mengatakan sudah menandatangani Peraturan Menpan & RB mengenai kelulusan CPNS dalam tes SKD. “Kita tak berorientasi pada passing grade, tapi berorientasi pada ranking. Kalau passing grade kita jalankan, SDM aparatur kembali mundur. Kita ingin maju,” tutur Syafrudin.

Dengan kebijakan ini, Syafrudin mencontohkan, jika suatu institusi kementerian memerlukan 100 PNS baru, akan diambil 300 orang dengan ranking

tertinggi untuk mengikuti seleksi berikut, yakni seleksi bidang. Dari seleksi tahap kedua ini, akan dipilih satu orang.

Sementara itu, secara terpisah Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan & RB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, Tim Seleksi CPNS sepakat mengambil kebijakan sistem ranking untuk mengakomodasi pelamar yang tak lolos. Penerapan kebijakan itu diyakini akan berjalan secara transparan. Namun, kebijakan sistem ranking tak berlaku bagi pelamar yang lolos murni.

“Calon ASN yang sudah lolos murni tak bersaing dengan calon ASN yang masuk dengan kebijakan baru di SKB. Itu *fairness*-nya,” ujar Setiawan (Kompas, 22/11/2018).

Kenyataan bahwa bahwa tingginya prosentase peserta yang tidak lolos mengikuti test SKD dalam seleksi penerimaan CPNS sebagaimana dipaparkan di atas memang patut digarisbawahi. Apalagi dengan melihat jumlah kelulusan yang rendah, diperkirakan jauh dari mencukupi untuk mengisi formasi yang tersedia. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut, selayaknya bisa kita maklumi.

Catatan lain yang perlu digarisbawahi adalah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2017 terhadap 36 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang

“

Batu fondasi untuk kesuksesan yang seimbang adalah kejujuran, karakter, integritas, keyakinan, cinta, dan kesetiaan.

-Zig Ziglar



dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 21 November 2018 lalu. SPI 2017 tersebut dilakukan KPK bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sebelumnya, KPK dan BPS juga melakukan hal yang serupa.

Ada empat dimensi penilaian yang disorot dalam SPI, yakni budaya anti korupsi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, dan sistem anti korupsi. Sedangkan responden yang disurvei berasal dari internal lembaga terkait, masyarakat pengguna layanan, dan ahli. Dari survei yang dilakukan, diperoleh indeks penilaian integritas setiap institusi dengan skala 0-100, dimana semakin mendekati 100 menunjukkan integritas yang baik dan rendah risiko korupsi, demikian pula sebaliknya.

Rata-rata penilaian integritas berada pada skor 66. Skor tertinggi diraih oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan skor 77,36, diikuti Pemerintah Kabupaten Badung (Bali) 77,15, Kementerian Keuangan 76,54, Kementerian Kesehatan 74,93, dan Pemerintah Kota Madiun (Jawa Timur) 74,15 (Kompas, 22/11/2018).

Ketua KPK Agus Rahardjo pada kesempatan tersebut menyampaikan, fenomena yang terekam dari hasil SPI 2017 perlu dijadikan bahan renungan bahwa upaya memperbaiki bangsa agar bebas dari korupsi masih panjang. "Kita masih perlu kerja keras. Hasil survei ini perlu ditindaklanjuti oleh setiap lembaga untuk perbaikan dan melakukan solusi yang tepat. Ada peningkatan upaya pemberantasan korupsi, tapi (berjalan) lambat," ujar Agus.

Sementara Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana menyatakan, bahwa dari hasil survei bukan berarti nilai tinggi lalu korupsi tidak akan terjadi. Karena korupsi dapat saja terjadi meski dalam sistem yang sudah mapan. "Ini potret lembaga kita semua. Artinya perbaikan harus dilakukan bagi semuanya, karena meskipun memiliki indeks di atas rata-rata, potensi korupsi ada di setiap lembaga," ujar Wawan.

Potensi korupsi ada di setiap lembaga: sebuah pernyataan yang perlu digarisbawahi, dan oleh karena itu peran pengawasan harus dioptimalkan dalam upaya pencegahannya.

(Edwardsyah Nurdin)



Pesan Moral dari Pengawasan melalui Pendekatan Agama

Oleh : *Ali Joto Manalu*
Auditor Utama pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Menyusul berita tentang kian banyaknya Kepala Daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2018, yang sampai 25 Oktober 2018 jumlahnya mencapai 95 orang, surat kabar Kompas terbitan 27 Oktober 2018 lalu mengulas tentang dampak negatif dari korupsi; yang tidak hanya mengancam tata kelola pemerintahan, tetapi juga merusak orientasi nilai di masyarakat. Di bawah judul berita "Kesadaran Moral Dirusak", Kompas memaparkan pandangan dari pengajar di Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, Meuthia Ganie Rochman. Menurut Meuthia, dalam jangka pendek, korupsi yang massif akan mendistorsi sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan kesejahteraan dan perbaikan institusi publik. Sementara dalam jangka panjang, korupsi merusak soliditas masyarakat, menimbulkan penyimpangan moral, dan menghasilkan irrasionalitas publik.

Di bagian lain, pengajar Filsafat Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Budi Hardiman, menyampaikan

kekhawatirannya bahwa yang paling parah dirusak oleh korupsi struktural adalah kesadaran moral. Ketika pemimpin justru berperilaku yang secara moral bermasalah, masyarakat bisa kehilangan orientasi nilai, menjadi kehilangan pegangan bersama atas apa yang dianggap baik dan buruk. Moralitas kemudian menjadi relatif (Kompas, 27/20/2018).

Membaca ulasan tersebut dan dikaitkan dengan pengawasan, beberapa dekade lalu Kementerian Agama telah memperkenalkan pendekatan lain dalam melaksanakan pengawasan, yaitu pendekatan melalui agama. Mengingat mayoritas bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, demikian pula aparat pemerintahan adalah orang-orang yang beragama, tentunya pengawasan dengan pendekatan agama barangkali masih relevan untuk diperhatikan, apalagi pendekatannya lebih berorientasi pada peningkatan nilai moralitas kemanusiaan.

Sepintas tentang Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan. Terkait dengan tugas dan fungsi pemerintahan, pengawasan yang efektif akan mampu memberikan kontribusi dalam mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan sehingga memberikan dampak positif bagi pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*). Hasil dari pengawasan dapat berfungsi sebagai umpan balik bagi para pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan serta langkah-langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Secara umum, pelaksanaan pengawasan mengacu kepada teori-teori dan praktik-praktik ilmu management. Namun, ada pendekatan lain dalam melaksanakan pengawasan, yaitu pendekatan melalui agama. Pengawasan dengan pendekatan agama (selanjutnya disingkat menjadi PPA) merupakan upaya penanaman nilai-nilai agama dengan sentuhan hati nurani sehingga mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan, merasa malu dan berdosa ketika melakukan penyimpangan dengan dilandasi kejujuran dan tanggung jawab. Melalui PPA dapat memberikan kesadaran kepada para aparatur negara untuk melaksanakan tugasnya dengan mengacu kepada peraturan-peraturan perundangan-undangan yang berlaku; memiliki daya tangkal dan kontrol untuk membangun kejujuran, keterbukaan, keadilan, ketulusan serta tidak membuka ruang sedikit pun untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela, kecurangan (*fraud*), korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN) dan lain-lain yang pada dasarnya diharamkan atau dilarang oleh setiap ajaran agama.

Implementasi Nilai-nilai dalam PPA

Pada dasarnya agama memberikan tuntunan bagi manusia untuk menerapkan nilai-nilai kehidupan yang luhur sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam pelbagai aspek kehidupan. Agama sebagai sistem nilai harus dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, dan masyarakat sehingga dapat menjwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan nilai-nilai keagamaan mempunyai daya tangkal yang efektif terhadap kecenderungan perilaku menyimpang, mengumbar hawa nafsu, bertindak di luar batas kemanusiaan atau pun norma hukum yang berlaku, melakukan KKN serta perilaku negatif lainnya. Di samping itu, setiap agama mengajarkan untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran dan kerja keras dalam bekerja.

Atas dasar hal tersebut maka dalam mempraktikkan PPA dilaksanakan melalui pendekatan rasional, afektif, pembiasaan (*habit forming*), dan keteladanan. Pendekatan rasional dilakukan melalui penanaman nilai-nilai keagamaan yang berkaitan dengan pengertian dan hakikat pengawasan, dapat dilakukan dengan menggunakan pemikiran logis dan argumentatif yang dapat diterima akal sehat. Sedangkan pendekatan afektif dilakukan dengan penanaman nilai-nilai agama yang berkaitan dengan pengawasan dan menyentuh hati nurani. Melalui pendekatan ini diharapkan agar perilaku masyarakat selalu dalam keseimbangan antara pertimbangan akal sehat dengan penghayatan hati nurani sesuai dengan fitrah kemanusiaan.



Pendekatan pembiasaan dilakukan melalui upaya penanaman nilai-nilai agama dalam pengawasan melalui penanaman tata nilai positif yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, pendekatan keteladanan ditunjukkan melalui penanaman nilai-nilai agama dalam pengawasan melalui contoh atau teladan yang baik dari aparatur negara dan para tokoh terhadap masyarakat pada umumnya.

Dengan mengacu pada pola pendekatan dalam mengimplementasikan PPA, dalam hal ini yang penting untuk digarisbawahi adalah pentingnya mempraktikkan nilai-nilai keagamaan dalam kaitannya dengan pengawasan. Prinsip pengawasan dalam agama pada dasarnya adalah upaya menjaga dan mengembalikan martabat manusia pada tempat terhormat sesuai dengan fitrahnya. Selain dari pada itu, ada pesan moral yang terkandung dalam implementasi PPA, yakni: hakikat hidup manusia, fitrah manusia, penegakan kebenaran, serta saling bernasihat dalam kebenaran dan kesabaran.

Dalam hal hakikat hidup manusia, agama mengajarkan bahwa manusia diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah dan mengabdikan kepada Tuhan

Yang Maha Kuasa. Dalam hal ini ibadah dipahami dalam dua dimensi, yakni dimensi vertikal dan dimensi horisontal. Dimensi vertikal berupa hubungan manusia dengan Tuhannya; serta dimensi horisontal berupa hubungan sesama manusia yang dilandasi dengan nilai agama.

Pesan moral dari hakikat hidup manusia untuk beribadah dan mengabdikan tersebut, jika disadari dan dihayati secara utuh oleh para aparatur negara, niscaya akan mampu membentuk pribadi yang bersikap jujur dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan penyimpangan dan kecurangan, karena perbuatan tersebut tidak terlepas dari pengawasan Tuhan. Ungkapan "*Tuhan Tidak Tidur*" adalah gambaran dari pesan moral tersebut.

Fitrah manusia ketika lahir pada hakikatnya dalam keadaan suci. Namun ketika menjalani kehidupannya, berbagai pengaruh dapat mengubah dan membentuk pribadi seseorang: bisa menjadi baik, atau bisa pula terjerumus dalam keburukan. Nilai ajaran agama pada dasarnya berperan sebagai tuntunan yang mengendalikan sikap dan perilaku manusia untuk memelihara fitrahnya yang suci itu.

Pengamalan ajaran agama yang konsisten dalam langkah perbuatan merupakan upaya pemberdayaan potensi fitrah manusia yang suci. Tentunya dalam hal ini pengejawantahan dari nilai-nilai keagamaan tidak hanya sekedar melaksanakan ritual keagamaan semata, namun harus direfleksikan pada pola sikap, tindakan, ucapan, perilaku kehidupan sehari-hari. Dan dalam hal ini, perbuatan-perbuatan yang bernuansa penyelewengan dan kecurangan jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan fitrah manusia.

Pesan moral lainnya dari PPA adalah penegakan kebenaran. Pada dasarnya manusia memang memiliki kecenderungan untuk mengekspresikan diri secara bebas melakukan penyimpangan karena pengaruh hawa nafsunya yang liar. Untuk itu, pengendalian dan pengawasan dibutuhkan agar relasi antara individu dan sosial tetap dalam keseimbangan dan berada dalam koridor kebenaran. Penegakan kebenaran dengan demikian perlu ditanamkan kepada para aparat penyelenggara negara demi terciptanya ketertiban dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai aturan yang berlaku.

Mengingat kelemahan manusia dalam mengendalikan hawa nafsu maka hubungan dengan sesama selayaknya

bersemangatkan untuk saling mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Semangat tersebut diwujudkan dalam upaya pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kecurangan, seperti penyalahgunaan wewenang, praktik-praktik KKN, ketidakpedulian terhadap penyimpangan dan perilaku buruk lainnya.

Pesan moral dari PPA berikutnya adalah saling bernasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Relasi antara sesama aparat negara dan masyarakat selayaknya dilandasi dengan semangat persaudaraan, saling memberi nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Pola kemitraan dalam arti positif dapat dilaksanakan dalam melaksanakan praktik-praktik pengawasan.

Beberapa pesan moral yang terkandung dalam PPA tersebut perlu disebarluaskan sebagai bagian dari upaya pencegahan terjadinya penyelewengan dan kecurangan di lingkup pemerintahan, sekaligus meningkatkan nilai-nilai spiritual dan moralitas di lingkungan aparaturnegara.

Sumber:
“Pengawasan dengan Pendekatan Agama”,
Inspektorat Jenderal Departemen Agama,
Jakarta, 2004.

“

Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

-Soekarno



AMMDes: Karya Anak Bangsa untuk Masyarakat Desa

Ketika Kementerian Perindustrian memfasilitasi produsen kendaraan Alat Mekanis Multiguna pedesaan (AMMDes) untuk ikut serta dalam pameran otomotif GIAAS 2018, tema yang diusung adalah “AMMDes Karya Anak Bangsa - Satu Alat Banyak Manfaat”. Sejatinya, keberadaan AMMDes sangat strategis untuk membantu meningkatkan perekonomian di pedesaan. Oleh karena itu, AMMDes hadir sebagai karya anak bangsa untuk masyarakat desa.

Ada yang menarik ketika diselenggarakan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIAAS) 2018 di ICE BSD City, Tangerang pada 2 Agustus lalu. Pada acara pembukaan, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan kendaraan Alat Mekanis Multiguna Perdesaan atau lebih dikenal dengan sebutan AMMDes. Pada kesempatan tersebut, Presiden menyatakan. “Saya menyambut baik inovasi AMMDes yang hari ini diluncurkan. Ini satu jenis kendaraan tapi kaitannya dengan industri hulu sangat banyak. Tadi dilaporkan lebih dari 70 industri komponen dalam negeri siap jadi pemasok”.

Pada saat bersamaan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, kendaraan yang diproduksi oleh PT Kiat Mahesa Winton Indonesia ini sudah siap untuk diproduksi secara massal. “Saat ini AMMDes siap diproduksi sebanyak 3.000 unit, dan kami akan tingkatkan menjadi 9.000 sampai 15.000 unit per tahun. Produksi secara massal akan dimulai pada Januari 2019,” kata Menteri Perindustrian. Selanjutnya, Menteri Perindustrian menjelaskan bahwa serangkaian uji coba telah dilakukan dalam pengembangan AMMDes, termasuk mengenai perizinan dengan Kementerian Perhubungan. “Sekarang masih diurus izinnya,

rencana bulan November dikeluarkan,” ungkapnya.

Sebelum di-launching pada pembukaan GIAAS 2018, Kendaraan AMMDes telah dipamerkan pada acara pameran AMMDes Summit & Exhibition di kantor Kementerian Perindustrian, 27 Maret 2018 lalu. Dalam sambutan pembukaan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, “Program AMMDes sangat strategis sebagai upaya untuk membantu meningkatkan perekonomian di pedesaan dengan menyiapkan alat transportasi multiguna baik sebagai alat transportasi maupun alat produksi.”

Menperin menjelaskan, kendaraan pedesaan dirancang dengan dua fungsi sekaligus, yakni fungsi transportasi untuk memobilisasi hasil-hasil pertanian dari desa ke kota, serta fungsi alat produksi dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian di pedesaan. Dengan fungsi mutiguna tersebut, kendaraan ini sangat ideal digunakan untuk meningkatkan konektivitas antara pusat

ekonomi di kota dan pusat penghasil kebutuhan pokok di desa.

Selanjutnya dijelaskan, selain dampak positif dibidang ekonomi, program AMMDes dapat membuka peluang bagi pelaku industri nasional untuk menguasai kemampuan bidang penelitian dan pengembangan (R&D), terutama rancang bangun dan desain otomotif. Menurut Menperin, kebutuhan kendaraan pedesaan dapat pula dijadikan sebagai *base load* pengembangan industri komponen otomotif dalam negeri. “AMMDes didesain dengan memaksimalkan kemampuan industri kita melalui penggunaan komponen yang dibuat di dalam negeri terutama oleh industri kecil dan menengah (IKM). Selain itu, *spare part* mudah didapat di pasaran serta pemilihan atau adopsi teknologi yang sesuai dengan kondisi alam dan demografi Indonesia,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kemenperin terus bertekad mengoptimalkan tingkat komponen dalam



negeri (TKDN) AMMDes melalui konsolidasi dengan para pelaku industri nasional. Upaya ini telah berhasil membangun komitmen kerjasama sebanyak 70 pelaku industri dalam negeri yang siap menjadi pemasok komponen AMMDes, di mana 22 diantaranya merupakan pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM),.

Terinspirasi dari Gerandong

Kehadiran AMMDes pada pameran otomotif GIAAS 2018 ini ternyata banyak menarik perhatian pengunjung. Sejatinya, menurut Presiden Komisaris PT Kiat Mahesa Wintor Indonesia (KMWI) dan PT Kiat Mahesa Wintor Distributor (KMWD) Sukiyat mengatakan, AMMDes bukan mobil, namun kendaraan. Kepada redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI yang mewawancarainya di Klaten akhir Oktober lalu, Sukiyat bercerita tentang awal mula ia terinspirasi membuat AMMDes. “Dalam perjalanan waktu setelah saya membuat (*prototype*) mobil ESEMKA saya terpikir untuk membuat

“mobil tapi bukan mobil betulan”, ujarnya setengah berseloroh. Lalu dijelaskannya bahwa AMMDes yang diciptakannya itu adalah kendaraan atau alat untuk aktivitas pertanian di desa. “Jadi, bila disamakan dengan mobil beda persepsinya,” ucap Kiat.

Lebih jauh, Sukiyat menceritakan bahwa ia terinspirasi membuat AMMDes adalah dari *gerandong*, yaitu sejenis kendaraan rakitan yang biasa digunakan untuk menggiling padi di pedesaan. “Karena saya pada dasarnya berasal dari pedesaan,” ujar Sukiyat, “saya terinspirasi dari *gerandong* yang dipakai di desa-desa. *Gerandong* itu biasa digunakan masyarakat desa untuk mengangkut atau menggiling padi, mengangkut kayu dan sebagainya”.

Namun, berbeda dengan *gerandong* yang peruntukannya terbatas maka AMMDes justru sebaliknya. Kendaraan AMMDes ini nantinya bisa disesuaikan peruntukannya, yakni untuk mengisi berbagai kebutuhan pertanian dan

perkebunan, mulai dari untuk pemotong dan penggilingan padi, pembuat pelet (makanan ikan), penyedot air, genset untuk penerangan, dan lain sebagainya. Boleh dikata, AMMDes sesuai dengan namanya adalah alat multi guna. "Satu alat bisa semua." ujar Sukiyat berulang kali.

Ketika ditemui oleh redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI di Klaten akhir Oktober lalu, Sukiyat bercerita banyak tentang proses kelahiran kendaraan AMMDes. Yaitu dimulai ketika dia berhasil membuat mobil Esemka yang diharapkan dapat diproduksi secara massal menjadi awal dari kelahiran mobil nasional. Sementara menunggu kepastian Esemka dapat diproduksi secara massal, Sukiyat terus menggali inspirasi sampai akhirnya pada tahun 2017 dia berhasil membuat *prototype* Moda Angkutan Hemat Pedesaan atau Mahesa Nusantara. Kendaraan pedesaan itu dilengkapi alat untuk mengoperasikan mesin-mesin pertanian. *Prototype* Mahesa Nusantara terus dikembangkannya hingga akhirnya menjadi alat mekanisasi multiguna pedesaan (AMMDes) Kiat Mahesa Wintor (KMW).

Kementerian Perindustrian merespon mimpi Sukiyat untuk memproduksi AMMDes secara massal, yang selanjutnya

memediasi dan mempertemukannya dengan beberapa pelaku industri, diantaranya PT. Astra Otoparts Tbk. Sukiyat memilih PT. Astra Otoparts Tbk. sebagai mitra usahanya. Ditanya kenapa memilih PT. Astra Otoparts, Sukiyat berujar: "Karena Astra Otoparts saya lihat sangat serius untuk mewujudkan keinginan saya untuk membuat AMMDes. Lagi pula fasilitas dan infrastruktur yang mereka miliki sudah siap. Dalam hal ini saham saya 49% dan Astra Otoparts 51%."

Spesifikasi Teknis dan Pemasaran

AMMDes yang akan diproduksi secara massal mulai Januari 2019 nanti memiliki tiga tipe, yaitu: *fix bin* yang dilengkapi *power take off* (PTO), *fix bin* dengan alat mesin pertanian (alsintan), dan *flat deck* atau *passanger* dengan PTO. Adapun mesin yang digunakan adalah mesin diesel bertenaga 14 PK, lengkap dengan elektrik *starter*. Kapasitas tangki bahan bakarnya mencapai 20 liter.

Desain bodi AMMDes mirip dengan mobil *pick up*, namun lebih mungil. Sementara kabin kendaraan bisa diisi dua orang penumpang, dan di belakangnya terdapat bak yang berfungsi mengangkut barang dengan daya angkut mencapai 700 kilogram.

Tidak hanya untuk mengangkut barang bawaan, bak belakang AMMDes juga dirancang untuk menampung mesin genset, pompa air, penggiling padi, pemutih beras dan lain-lain yang akan terus dikembangkan inovasinya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ataupun pembelinya. Sedangkan dimensi bodi berukuran panjang 358 sentimeter, lebar 137 cm, dan tinggi 190 cm. Untuk jarak sumbu rodanya 190 cm, dengan radius putar 4,0 meter. Sementara untuk pengereman sudah mengadopsi sistem *disc brake* pada empat rodanya.

Ketersediaan suku cadang atau komponen dari kendaraan tersebut dipastikan cukup banyak di pasaran, sehingga konsumen tak perlu khawatir. Dalam hal ini, PT. KMWI selaku produsen AMMDes telah membangun komitmen kerja sama dengan lebih dari 70 industri komponen dalam negeri untuk menjadi pemasok (*vendor*) dari berbagai komponen yang dibutuhkan.

Presiden Komisaris PT. KMWI Sukiyat menjelaskan, para *vendor* tersebut yang mengatur dan menyediakan komponen yang dibutuhkan, kemudian pabrik tinggal merakitnya secara massal. "Ada *vendor-vendor* yang menyediakan. Para *vendor* tersebut yang mengatur komponen-komponen yang kita butuhkan. Kemudian pabrik tinggal merakitnya secara massal," ujar Sukiyat.

Pada umumnya, sekitar 80 persen komponen untuk kendaraan AMMDes merupakan komponen dalam negeri, sedangkan 20 persen sisanya masih impor. "Komponen yang masih impor tersebut umumnya yang berhubungan dengan permesinan," jelas Sukiyat.

Sukiyat juga menjelaskan, pihaknya beberapa waktu lalu telah menyerahkan satu unit kendaraan AMMDes ke kelompok tani di Magelang untuk dilakukan uji coba. "Saya lakukan itu supaya diujicoba terlebih dahulu sebelum nanti diproduksi massal. Supaya apa? Supaya kita memperoleh masukan apa-apa yang masih menjadi permasalahan dari kendaraan AMMDes ini. Karena kita ingin meminimalisir hal-hal yang tidak beres dari kendaraan ini," papar Sukiyat.

Terkait dengan masalah pemasaran, Sukiyat yakin bahwa tidak ada masalah untuk memasarkan produk yang diinisiasinya itu. Menurut Sukiyat, sudah ribuan kendaraan AMMDes yang dipesan. Bahkan, Bangladesh sudah memesan 1.000 unit. Dalam wawancara dengan Redaksi SOLUSI, Sukiyat dengan penuh keyakinan menyatakan, "Tahun 2019 nanti kita sudah targetkan memproduksi 15.000 unit, dan kami yakin akan terjual".

Untuk kemajuan industri nasional dan peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan, tentu kita semua berharap kelahiran AMMDes akan mewujudkan secara nyata.

(Edwardsyah Nurdin).

“

Sahabat dalam kesulitan adalah sahabat dalam segala-galanya. Jangan sepelekan persahabatan. Kehebatannya lebih besar daripada panasnya permusuhan.

-Pramoedya Ananta Toer





“Satu Alat Bisa Semua”

Satu alat bisa semua,” kata H. Sukiyat berulang kali ketika dengan penuh semangat menjelaskan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes), yang akan mulai diproduksi secara massal mulai tahun 2019 mendatang. Mengaku terinspirasi dari Gerandong, yakni kendaraan sederhana untuk membantu pertanian di pedesaan, Sukiyat menjelaskan maksudnya membuat AMMDes adalah, “agar ekonomi tumbuh di pedesaan, yang mayoritas penduduknya adalah petani.” Untuk mengetahui lebih mendalam tentang AMMDes, redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI melakukan wawancara dengan Presiden Komisaris PT. Kiat Mahesa Wintor Indonesia (KMWI dan PT. Kiat Mahesa Wintor Distributor (KMWD) Sukiyat akhir Oktober lalu di Klaten. Berikut petikannya:

Pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show awal Agustus lalu, kendaraan AMMDes diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Sejak kapan kendaraan tersebut mulai dibuat dan apa yang melatarbelakanginya?

Dalam perjalanan waktu setelah saya membuat (*prototype*) mobil ESEMKA saya terpikir untuk membuat “mobil tapi bukan mobil betulan”. Karena saya pada dasarnya berasal dari pedesaan, saya terinspirasi dari “gerandong” yang dipakai di desa-desa. Gerandong itu biasa digunakan masyarakat untuk mengangkut atau menggiling padi, mengangkut kayu dan sebagainya.

Kenapa saya terpikir untuk membuat AMMDes? Tidak lain maksudnya agar ekonomi tumbuh di pedesaan, yang mayoritas penduduknya adalah petani. Bagaimana pun saya ini anak seorang petani. Bapak saya punya sawah luas dan punya usaha penggilingan padi.

Keinginan saya itu direspon oleh Kementerian Perindustrian, yang memediasi dan mempertemukan saya dengan beberapa pelaku industri, diantaranya adalah dengan Astra Otoparts. Akhirnya saya memilih Astra Otoparts.

Kenapa memilih ASTRA?

Karena Astra Otoparts saya lihat sangat serius untuk mewujudkan keinginan saya untuk membuat AMMDes. Lagi pula fasilitas dan infrastruktur yang mereka miliki sudah siap. Dalam hal ini saham saya 49% dan Astra Otoparts 51%.

Apakah sudah ada produk kendaraan AMMDes yang telah dibuat?

Sudah ada yang kami buat. Sudah 85 unit contoh yang kita buat, diantaranya yang kemarin (Agustus lalu) *diluncurkan* dan dipamerkan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show. Tentu saja contoh-contoh tersebut masih dibuat secara manual. Nanti setelah pabrik dioperasikan, pembuatannya tentu secara massal.

Nantinya kendaraan AMMDes dapat dimanfaatkan untuk keperluan apa saja?

Satu alat bisa semua. Artinya, kendaraan AMMDes ini bisa untuk apa saja, tergantung peralatan yang kita pasang di kendaraan tersebut. Dipasang penyedot air, bisa untuk menyedot air. Dipasang alat pemotong dan penggiling padi, bisa untuk memotong dan menggiling padi; serta membuat pelet. (Karena) ini adalah alat penggerak. Tinggal nantinya kita pasang peralatan yang kita butuhkan. Jadi, AMMDes ini adalah alat multi guna.

Bahkan saya sedang pikirkan alat untuk penggiling tebu (yang bisa dipakai di AMMDes). Supaya tebu-tebu itu tidak perlu dibawa ke pabrik gula. Jadi bisa langsung kita giling di kebun, dan yang dibawa ke pabrik tinggal cairan hasil gilingannya.

Beberapa waktu lalu saya sudah menyerahkan satu unit kendaraan AMMDes untuk diujicoba oleh kelompok tani di Magelang. Saya lakukan itu supaya diujicoba terlebih dahulu sebelum nanti diproduksi massal. Supaya apa? Supaya kita memperoleh masukan apa-apa

yang masih menjadi permasalahan dari kendaraan AMMDes ini. Karena kita ingin meminimalisir hal-hal yang tidak beres dari kendaraan ini.

Apakah produk kendaraan sejenis AMMDes ini telah ada sebelumnya?

Belum ada. Ini yang pertama kalinya. Sebelumnya memang ada yang seperti ini, yang namanya *gerandong* itu. Tapi AMMDes ini beda lho dengan *gerandong*, walaupun *gerandong* itu yang menginspirasi saya membuat kendaraan AMMDes ini.

Bagaimana dengan kandungan komponen lokal dari kendaraan AMMDes?

Pada umumnya, sekitar 80 persen merupakan komponen dalam negeri, sedangkan 20 persen sisanya yang masih impor. Komponen yang masih impor tersebut umumnya yang berhubungan dengan permesinan.

Untuk pembuatan komponen-komponen dalam negeri, siapa yang mengerjakan?

Ada vendor-vendor yang menyediakan. Para vendor tersebut yang mengatur komponen-komponen yang kita butuhkan. Kemudian pabrik tinggal merakitnya secara massal.

Kita punya dua pabrik. Satu di Jakarta (Citeureup), dan satu lagi di sini (Klaten). Yang di Jakarta dikelola oleh PT. KMWI, yang khusus melayani kebutuhan Pemerintah. Sedangkan pabrik yang di Klaten dikelola oleh PT. KMWD. Ini untuk melayani kebutuhan masyarakat umum.

Tantangan atau hambatan apa yang mungkin dihadapi terkait dengan pembuatan AMMDes?

Saya rasa tidak ada tantangan atau hambatan yang berarti. Paling-paling masalah-masalah kecil. Tapi saya sudah biasa menghadapi masalah-masalah kecil yang mungkin ditemui nantinya.

Bagaimana dengan masalah pemasaran?

Tidak ada masalah. Bahkan sekarang saja yang pesan sudah ribuan. Dari luar Jawa sudah banyak yang datang ke sini dan memesan AMMDes. Bahkan Bangladesh sudah pesan 1.000 unit.

Tahun 2019 nanti kita sudah targetkan memproduksi 15.000 unit, dan kami yakin akan terjual.

Bagi masyarakat pedesaan, manfaat ekonomis apa yang bisa diperoleh dengan adanya kendaraan tersebut?

Manfaatnya bagi masyarakat pedesaan sangat besar. Terutama bagi para petani, karena dapat meningkatkan perekonomian mereka. Jadi, dengan adanya AMMDes ini akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di pedesaan, mengurangi urbanisasi dan mobilitas penduduk dari desa ke kota, menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat pedesaan. Selain dari pada itu pemuda-pemuda di pedesaan akan lebih senang ke sawah atau kebun. Kemudian, untuk mengisi waktu kosong, para pemuda dapat memanfaatkan AMMDes ini untuk kegiatan-kegiatan produktif, seperti membuat pelet, menyedot air dan sebagainya. Karena AMMDes ini adalah "satu alat bisa semua".

(SB/EN/Gsn)



Perubahan Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

Memasuki era revolusi industri 4.0, Kementerian Perindustrian terus berbenah. Salah satu diantaranya melalui restrukturisasi organisasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada tanggal 16 Agustus 2018 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kementerian Perindustrian sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015. Perubahan struktur organisasi Kementerian Perindustrian tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk mendorong dan meningkatkan kebijakan di bidang perindustrian yang komprehensif, terintegrasi, dan kompetitif.

Salah satu poin penting dari perubahan organisasi Kementerian Perindustrian adalah penambahan fungsi yang dilaksanakannya, yaitu bahwa Kementerian Perindustrian juga melaksanakan fungsi pembangunan sumber daya manusia di bidang industri,

sebagaimana termuat dalam Pasal 3 huruf d1, Wujud dari perubahan fungsi tersebut adalah dibentuknya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri. Di sisi lain, salah satu direktorat jenderal dihilangkan, yaitu Ditjen Permukiman Perwilayahan Industri, dimana cakupan tugas dan fungsinya dialihkan ke ditjen yang lain.

Atas perubahan tersebut maka Kementerian Perindustrian kini terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Agro; c. Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (sebelumnya Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka); d. Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; e. Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (sebelumnya Ditjen Industri Kecil dan Menengah); f. Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (sebelumnya Ditjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional); g. Inspektorat Jenderal; h. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan i. Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri (sebelumnya tidak ada).

Demikian pula bidang-bidang Staf Ahli juga berubah menjadi: Staf Ahli bidang Pendalaman, Penguatan, dan Penyebaran Industri; Staf Ahli bidang Iklim Usaha dan Investasi; dan Staf Ahli bidang Komunikasi.

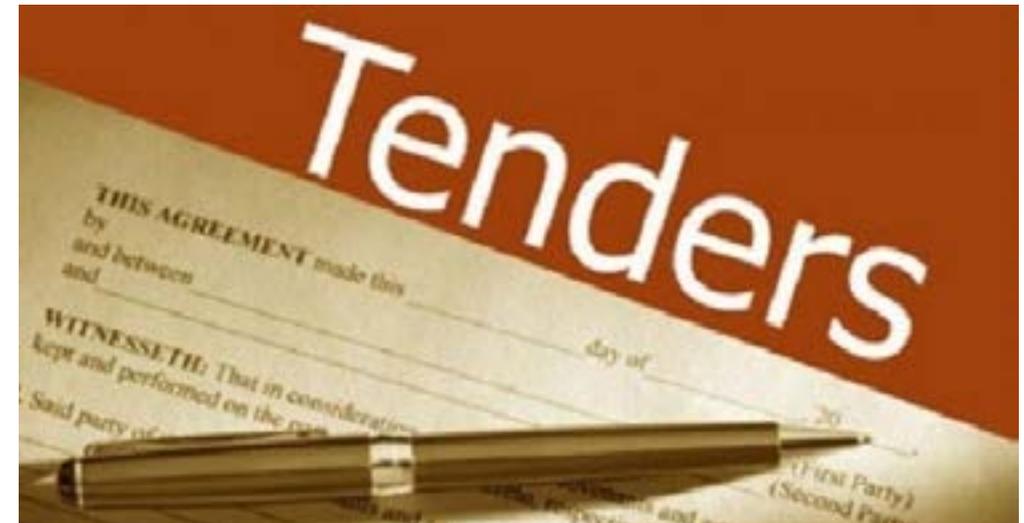
Sebagai satuan kerja yang baru dibentuk, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis pembangunan sumber daya manusia industri; pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sumber daya manusia industri; pelaksanaan administrasi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Menyusul perubahan organisasi tersebut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada tanggal 15 November

lalu telah melantik 38 pejabat eselon II di lingkungan Kemenperin. Pengisian ini disesuaikan dengan perubahan organisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kementerian Perindustrian.

Pada saat bersamaan Menteri Perindustrian juga melantik Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian. Sebelumnya, Setyo menduduki jabatan Kepala Divisi Humas Polri. Dalam sambutannya, Menteri Perindustrian menyatakan, "Irjen adalah jabatan yang strategis di lingkungan Kemenperin. Tidak hanya bertugas menyelenggarakan fungsi pengawasan, tetapi juga melakukan pengawalan program dan kegiatan sektor perindustrian."

Atas telah dilantiknya pejabat definitif Inspektur Jenderal Kemenperin, segenap jajaran Inspektorat Jenderal Kemenperin mengucapkan: "Selamat datang, Bapak Setyo Wasisto. Kami siap menerima arahan melaksanakan pengawasan, dan pengawalan program serta kegiatan sektor perindustrian." (Edwardsyah Nurdin).



Pelayan Publik Bergaya Entrepreneur: Cara Efektif Melakukan Pengawasan Pengadaan

Oleh : Khairul Rizal

Ketua I Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Istilah *entrepreneurial government* (EG) merupakan istilah yang mungkin belum populer di negeri ini. Padahal di Indonesia, EG pernah diperkenalkan dan diterapkan dengan istilah *entrepreneurial public service* (EPS) atau pelayanan publik bergaya kewirausahaan.

EG atau EPS sebetulnya bukanlah barang baru. Secara teori, hal itu diajarkan di sekolah administrasi publik paling terkenal di dunia, Harvard University. Adalah Fadel Muhammad, ketika menjadi Gubernur Gorontalo dan Menteri Perikanan dan Kelautan, yang menerapkan EG/ EPS ini dalam institusinya.

Pada praktik EG, seorang kepala daerah berperan layaknya seorang CEO (*chief executive officer*) di perusahaan yang mengendalikan daerah dengan pola berpikir kewirausahaan. Semua sumber yang ada baik dari sumber daya alam

(SDA)/infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan sistem pemerintahan dikelola untuk mencapai keuntungan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu pegawai pemerintah, semua para pihak terkait dan rakyat.

Pada korporasi, keuntungan akan berupa profit dan pembagian dividen ke pemegang saham, sedangkan dalam konteks EG dividennya ialah peningkatan kepuasan dan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Hal itu dapat terlihat dari indikator meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), berkurangnya orang miskin, meningkatnya kesejahteraan pegawai yang menjalankan roda pemerintahan, yang otomatis berdampak pada kurangnya tingkat korupsi di daerah tersebut.

Seorang kepala daerah ditantang untuk dapat mengidentifikasi kekuatan (*strength*) dan peluang di daerahnya.

Peluang ini dapat berupa potensi SDA (di bawah permukaan bumi, lahan pertanian yang subur, pariwisata, perikanan, dan kelautan), atau letak yang strategis sebagai logistik (*trade hub*). Singapura menjadi contoh sebagai salah satu negara yang dapat memanfaatkan lokasi/letaknya sebagai kota trade and logistic hub sangat sukses.

Singapura menjadi kota atau negara maju yang mampu memberikan dividen berupa kepuasan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Dalam mewujudkan ini, para kepala daerah untuk inisiasi dapat mengundang para ahli, konsultan, atau wiraswastawan sukses sebagai partner atau bagian dari tim implementasi.

Mengubah mindset

Anggaran berbasis kinerja (ABK) merupakan salah satu produk reformasi birokrasi. Pada ABK, kinerja (*outcome*) dari sebuah program kerja dan output dari sebuah kegiatan menjadi dasar utama pengeluaran anggaran. Dalam konteks mewujudkan EG diperlukan strategi mengelola ABK ini dengan lebih fokus dan terukur.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didesain sedemikian rupa untuk mencapai target daerah yang jelas dan tajam. Target daerah misalnya, dengan menaikkan produksi

beras dari 3 ton/hektare menjadi 6 ton/hektare, mencapai 1 juta ton produksi jagung/tahun, meningkatkan kunjungan wisatawan dari 500 ribu orang/tahun menjadi 1 juta orang/tahun, dan sebagainya.

APBD didesain sebagai modal untuk mencapai target yang dicanangkan dan berorientasi produktif dengan indikator peningkatan pencapaian yang jelas. Semua kegiatan dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diarahkan untuk mencapai target daerah. Jika misalnya menaikkan produksi pertanian menjadi target dan fokus utama suatu daerah, anggaran SKPD Pekerjaan Umum di daerah tersebut diarahkan untuk membangun sarana/prasana yang mendukung pertanian. Anggaran pada SKPD Pertanian diarahkan untuk mendapatkan bibit, penyuluhan pertanian, dan membangun sistem pertanian yang andal. SKPD-SKPD yang lain diarahkan untuk mendukung pencapaian target tersebut dan masing-masing memiliki *key performance indicator* (KPI) yang terukur.

Terhadap seluruh karyawan di daerah harus ditanamkan dan diubah pola pikir (*mindset*) mereka, bahwa anggaran belanja daerah adalah modal yang harus dikelola dan dikeluarkan untuk suatu kegiatan yang akan memberikan nilai tambah, atau penguatan terhadap program yang ditentukan, bukan sekadar

“

Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh, kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa.
-Buya HAMKA



biaya yang perlu dihabiskan. Seorang kepala daerah (CEO) harus mampu meyakinkan dengan menggunakan dan mengelola APBD yang baik dan benar, dan akan tercapai target yang dicanangkan berupa peningkatan PAD atau kesejahteraan rakyat seperti keuntungan di perusahaan.

Dengan peningkatan PAD, kepala daerah dapat memberikan insentif atau tunjangan kinerja yang nilainya cukup besar bahkan dapat beberapa kali lebih tinggi daripada pendapatan gaji resmi. Peningkatan pendapatan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak dan retribusi sebagai konsekuensi dari hasil pencapaian target daerah, juga dari dividen yang dihasilkan oleh BUMD (badan usaha milik daerah). BUMD dapat menjadi kendaraan strategis untuk meningkatkan penghasilan daerah. Sebagai konsekuensinya BUMD harus dikelola profesional, tidak dicampuri dengan kegiatan politis dan balas budi.

Masalah pengadaan

Sudah bukan rahasia lagi nilai pengadaan yang rata-rata berkisar 40%-55% dari APBN/APBD merupakan lahan atau pos dalam APBN/APBD yang digunakan banyak pihak untuk

mendapatkan penghasilan tambahan yang tidak halal atau korupsi. Hampir 44% kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan kasus rekayasa pengadaan, dan bisa dikatakan pengadaan menjadi kegiatan yang 'ngeringeri sedap'. Pengadaan sudah tidak berorientasi sebagai modal atau bagian pencapaian target daerah, tetapi menjadi pos untuk melewati komisi atau titipan yang akhirnya membuat pusing panitia pengadaan/unit layanan pengadaan (ULP) dalam merekayasa volume, unit cost, dan dokumen pengadaan lainnya.

Pengadaan saat ini dilakukan sangat transaksional. Banyak paket pengadaan direkayasa menjadi paket-paket kecil dengan maksud menghindari lelang, atau menjadi paket besar dan khusus sehingga tidak banyak peserta yang bisa mengikuti. Umumnya pengadaan sudah dikemas dari tahap perencanaan anggaran, perencanaan pengadaan, pelaksanaan, hingga penentuan pemenang. Biasanya pemenang dan harga sudah didesain. Walau dokumen terlihat rapi, pada akhirnya pengadaan tidak memenuhi tujuan pengadaan yang 5T (tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga). Pengadaan pun akhirnya menjadi kegiatan mengada-ada.

Melihat problem dan tantangan tersebut pemerintah melakukan berbagai reformasi baik dari sisi regulasi, penyediaan infrastruktur *e-procurement* (*e-tender*, *e-purchasing*, dan *e-catalog*) sebagai alat bantu teknologi, maupun SDM. Reformasi ini mencoba mengembalikan pengadaan sehingga mencapai tujuan pengadaan yang 5T dan dilakukan dengan prinsip serta pedoman umum pengadaan. Pemerintah melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) mendorong pengadaan yang strategis ini. Untuk barang yang berspesifikasi standar, telah ada di pasar, dan telah terjadi kompetisi dapat dimasukkan ke *e-catalog* dan pengadaan seterusnya tidak perlu dengan lelang.

Pengadaan yang strategis (*strategic procurement*) adalah pengadaan yang berorientasi untuk memenuhi rencana strategis daerah. Dengan pengadaan yang strategis dan kredibel akan dihasilkan barang/jasa untuk mencapai tujuan EG dengan lebih efisien. Paket pengadaan yang selama ini dipecah-pecah menjadi paket-paket kecil dikonsolidasi menjadi paket yang nilainya besar dan dapat di-*e-catalog*-kan.

Untuk kebutuhan yang selama ini menjadi paket khusus dan hanya bisa diikuti oleh penyedia yang terbatas, justru dipecah menjadi paket-paket yang spesifikasinya standar dan penyediaanya banyak agar terjadi kompetisi. Pengadaan berorientasi jangka panjang sebagai bagian utama dalam mewujudkan dan mencapai rencana strategis daerah.

Pengadaan dilakukan dengan alat bantu elektronik dan berorientasi *procure to pay*, pembayaran diusahakan dilakukan segera setelah barang/jasa telah diterima atau berita acara pe-

kerjaan diselesaikan, sehingga menjadi suatu sistem yang kredibel.

Dalam kondisi reversal, pengadaan strategis diharapkan mendorong kegiatan efisiensi pengelolaan anggaran untuk mencapai tujuan pengadaan serta target pencapaian daerah yang direncanakan. Seorang kepala daerah yang bertindak seperti CEO akan berusaha mendorong pengadaan barang/jasa seefisien mungkin untuk mendapatkan barang/jasa dengan kualitas tinggi dan harga kompetitif atau di bawah harga pasar.

Pengadaan dilakukan untuk mendapatkan penyedia yang kompeten, bukan penyedia yang hanya memiliki dokumen pengadaan tetapi tidak memiliki peralatan, SDM maupun sistem pendukung dan pelayanan purnajual yang baik.

Laba tambahan yang menghasilkan dividen berupa kepuasan dan peningkatan kesejahteraan rakyat juga pendapatan para pelaksana pengadaan melalui tunjangan kinerja secara halal menjadikan para kepala daerah yang berorientasi entrepreneur sebagai pribadi-pribadi yang didoakan dan akan dipilih kembali tanpa perlu biaya kampanye yang besar. Pengawasan terhadap proses pengadaan yang dilakukan dari dalam diri para pelaksana yang sudah puas dengan tambahan pendapatan rutin bulanan, yang besarnya bisa mencapai dua sampai empat kali gaji, merupakan motivasi kuat meninggalkan *mark-up* atau praktik-praktik korupsi melalui pengadaan.

Pengawasan pengadaan melalui pengelolaan pemerintahan bergaya *entrepreneurship government* adalah cara kreatif menyelesaikan masalah pengadaan secara strategis dan membumi, hal ini sudah pernah dilakukan dan dibuktikan di Indonesia.



SMK - SMTI Yogyakarta: Setelah Pencanangan Zona Integritas

Dua tahun lalu SMK - Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Yogyakarta dinyatakan berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian PAN & RB. Sebagai kelanjutannya, tahun ini kembali dinilai untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Apapun hasilnya, yang penting telah berusaha mengimplementasikan zona integritas.

Setelah mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada April 2015 di lingkungan Kementerian Perindustrian, Unit Penggerak Integritas menetapkan lima unit kerja yang berpotensi meraih predikat zona integritas, salah satu di antaranya adalah SMK - Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI), Yogyakarta. Kelima unit kerja tersebut kemudian diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN & RB) untuk dievaluasi dan dinilai.

Hasil penilaian dari Kementerian PAN & RB membuahkan hasil tak terduga: SMK-SMTI Yogyakarta ditetapkan sebagai salah satu dari 17 unit kerja pelayanan publik yang menerima penghargaan dengan predikat WBK. Pemberian penghargaan dilakukan di Pekanbaru,

Riau pada 10 Desember 2016 bersamaan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.

Mengenang penghargaan yang bersejarah itu, Kepala SMTI Yogyakarta Rr. Ening Kaekasiwi menceritakan kekagetan mereka karena tidak menyangka akan memperoleh penghargaan WBK. "Kami terus terang kaget ketika diumumkan memperoleh penghargaan WBK. Kami benar-benar tidak menyangka," ujar Ening kepada redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI di ruang kerjanya akhir Oktober lalu. Kekagetan itu beralasan, karena dari lima unit kerja yang diusulkan ternyata hanya SMTI Yogyakarta satu-satunya yang pertama kali berhasil memperoleh penghargaan itu. "Padahal, tadinya kami hampir tidak ikut, namun atas dorongan dari Tim Penilai Internal Kemenperin, kami akhirnya tetap diikuti. Eh,



ternyata kami yang memperoleh predikat WBK dari Kemenpan & RB,” kenang Ening.

Sebagai salah satu unit pendidikan di lingkungan Kemenperin, SMTI Yogyakarta nyatanya memang menonjol dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada para siswa. Hal itu barangkali yang mendorong diperoleh nilai sehingga mampu meraih predikat WBK. Kepada



Redaksi SOLUSI, Rr. Ening Kaekasiwi menuturkan, “Seperti diketahui, penilaian dilakukan terhadap beberapa aspek, salah satunya adalah dari segi pelayanan. Karena kita adalah unit pendidikan, tentu dalam hal ini adalah bagaimana kita memberikan pelayanan dalam mendidik para siswa.”

Menurut Ening, ketika dilakukan penilaian oleh Tim Penilai dari Kemenpan & RB, para siswa disurvei langsung oleh Tim, untuk mengetahui seberapa besar integritas dari pengajar maupun staf karyawan sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini pihak sekolah tidak bisa mengkondisikan para siswa untuk memberi jawaban.

Ini dikarenakan survei oleh tim penilai dilakukan secara acak. Tim penilai sendiri yang memilih siswa yang akan disurvei. Misalnya, seorang siswa yang baru saja menyelesaikan tugas praktik di laboratorium tiba-tiba saja ditarik oleh tim penilai dan ditanya macam-macam. Siswa tersebut akan langsung menjawab tanpa ada intervensi dari pihak sekolah.

Cerita tentang prestasi meraih predikat WBK dimulai segera setelah zona integritas dicanangkan. Kepala Sekolah SMTI Yogyakarta yang ketika itu dijabat oleh Dra. Tri Ernawati, M.Si segera mengambil langkah-langkah awal yang harus dijalankan. Pertama, seluruh pegawai mulai dari pimpinan sampai ke lapis paling bawah mengikat komitmen bersama dengan menandatangani pakta integritas. Kemudian pihak sekolah membentuk tim zona integritas yang bertugas mempersiapkan segala sesuatunya, baik berupa dokumen penunjang maupun bukti tindak lanjut dari instrumen yang berkaitan dengan implementasi zona integritas. Komitmen untuk menjadikan SMTI Yogyakarta masuk dalam kawasan zona integritas

juga disosialisasikan kepada para siswa dan orang tuanya, serta mitra kerja dari kalangan industri. “Dalam sosialisasi itu, kita edukasi mereka mengenai sikap dan perilaku ketika kita berada di zona integritas,” tutur Ening.

Dengan keberhasilan meraih predikat WBK, tentu ada beban moral yang dirasakan oleh para pegawai dan pengajar. “Tentu ada beban moral,” ujar Ening, “tapi kami merasa lebih enak untuk menjalaninya karena memperkecil kemungkinan orang lain untuk melakukan kecurangan, utamanya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Sejak menerima predikat WBK, tidak ada lagi yang menitip-nitip minta tolong agar anaknya bisa diterima di SMTI. Tidak ada pengaduan-pengaduan masyarakat bahwa ada praktik pungli, dan sebagainya.”

Menuju WBBM

Setelah meraih predikat WBK, tahapan selanjutnya adalah menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Walaupun persiapan ke arah sana agak terlambat karena faktor ketidaktahuan, namun pihak sekolah siap menjalaninya. Bahkan proses penilaian oleh Kemenpan & RB telah dilakukan beberapa waktu lalu.

Berbeda dengan penilaian WBK, penilaian untuk meraih predikat WBBM dari Kemenpan & RB ternyata juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei terlebih dahulu. Survei yang dilakukan lebih berorientasi kepada kepuasan pelanggan, yang dilakukan secara acak dalam memperoleh responden yang terdiri dari para siswa, orang tua siswa bahkan juga beberapa alumni. Kepada para siswa, mereka secara acak mewawancarai 15 siswa sebagai sample. Kemudian mereka meminta data orang tua siswa kelas X sebanyak 288 orang tua siswa. Siapa orang tua siswa yang dijadikan sample, pihak sekolah tidak mengetahuinya. Demikian pula beberapa nama alumni sekolah juga diminta oleh petugas survei untuk dijadikan responden.

“Setelah disurvei oleh BPS, Tim Penilai dari Kemenpan & RB juga datang ke mari,” tutur Ening menceritakan proses penilaian WBBM. “Mereka mewawancarai kami, melihat dokumen-dokumen terkait dengan WBBM. Kami juga mempresentasikan apa-apa yang telah kami lakukan terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan zona integritas.

Seperti biasa, hasil penilaian terhadap WBK dan WBBM akan diumumkan



tanggal 10 Desember mendatang, bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia. Pihak sekolah dalam hal ini memang berharap kejadian seperti dua tahun lalu, ketika SMTI Yogyakarta dinyatakan memperoleh predikat WBK, kembali terulang. Namun, apapun hasilnya, semuanya diserahkan kepada Tim Penilai. “Yang penting, kita telah berusaha,” tutur Erning tentang harapan pihak sekolah. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa dalam hal pengimplementasian zona integritas ini, ada rasa syukur di hatinya karena para guru, pegawai dan siswa SMTI member support. Artinya, lingkungan sekolah sangat mendukung langkah-langkah untuk meraih WBBM.

Role Model Vokasi Industri

SMK – SMTI Yogyakarta yang berlokasi di jalan Kusumanegara No. 3, Yogyakarta telah menjalani sejarah yang panjang. Tahun ini genap 71 tahun sudah usianya dan telah berhasil menjadi role model sekolah vokasi industri. Sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenperin dengan akreditasi A, sekolah ini sebelumnya dikenal dengan nama Sekolah Teknologi Menengah Atas (STMA). Resmi berdiri pada tahun 1947, pemrakarsa berdirinya STMA adalah Soekarnen Kertoredjo, yang

saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pendidikan Pusat Jawatan Perindustrian dan Kerajinan yang bernaung di bawah Kementerian Kemakmuran. Itu pula yang menyebabkan Soekarnen Kertoredjo dikenang sebagai “Bapak STMA”. Tahun 1985, STMA berganti nama menjadi Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI); dan berganti nama lagi menjadi SMK-SMTI pada tahun 2011 lalu.

Sama seperti unit-unit pendidikan lain di lingkungan Kemenperin, SMTI Yogyakarta juga berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri. Model pendidikan itu menyebabkan daya serap siswa yang langsung bekerja setelah lulus demikian tinggi. Sebanyak 85% lulusan langsung memperoleh pekerjaan dan penempatannya melalui bursa kerja sekolah. Hanya 10% lulusan yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan sisanya membuka usaha sendiri.

Sebagai sekolah menengah kejuruan yang *link and match* dengan industri, SMTI Yogyakarta memiliki tiga jurusan pendidikan, yaitu: Kimia Analisis, Kimia Industri, dan Mekatronika. Kompetensi dari jurusan Kimia Analisis mengarah pada pekerjaan *laboratory* dengan kompetensi: kontrol kualitas, pengelolaan laboratorium, dan *health*

& *safety environment*. Sedangkan kompetensi pada jurusan Kimia Industri adalah terkait dengan pekerjaan *production*, dengan kompetensi: proses produksi, kontrol proses, dan *health & safety environment*.

Sementara untuk jurusan Mekatronika lebih berorientasi pada mekanik mesin, teknologi informasi dan elektronika dengan standar kompetensi: menerapkan sistem mikroprosesor dan mikrokontroler, dasar-dasar teknik mesin, pengukuran besaran listrik, membuat gambar teknik, pekerjaan bengkel elektronika, penggunaan perkakas tangan mekanik, pengoperasian mesin perkakas *power tool*, penggunaan sensor dan transmitter sesuai standar industri, pengoperasian peralatan kelistrikan, pneumatik dan hidrolis, serta pengoperasian *programmable logic controller (PLC)*, SCADA dan DCS. “Jurusan Mekatronika ini baru dibuka. Jurusan baru ini satu-satunya yang ada di Yogyakarta, sebagai bentuk terobosan baru menyambut era industri 4.0,” jelas Ening.

Prestasi yang diraih pun patut diacungi jempol. Selain berhasil meraih predikat WBK, juga pernah meraih Citra Pelayanan Prima dari Kemenperin & RB. Di samping itu, dalam beberapa tahun terakhir jumlah lulusan pada ujian nasional mencapai angka 100%; dan pada tahun 2016 lalu memperoleh peringkat pertama dari 32 SMK se-Kota Yogyakarta, serta peringkat kedua dari 210 SMK se-DI Yogyakarta.

Keberhasilan SMTI Yogyakarta dalam menghasilkan tenaga-tenaga SDM industri yang berkualitas tak lepas dari komitmen para guru dan karyawan dalam membina para siswa. Jumlah guru yang ada sebenarnya terbilang kurang, dan untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan merekrut pengajar

honoror sesuai kebutuhan. Sementara fasilitas belajar-mengajar tergolong cukup memadai. Untuk meningkatkan kenyamanan belajar tiap kelas dilengkapi dengan proyektor LCD dan OHP.

Fasilitas lain yang dimiliki adalah ruang pendidikan teori, ruang laboratorium beserta peralatan laboratorium, perpustakaan dengan sistem *digital library*, area *WiFi Hotspot*, unit kesehatan siswa, *meeting room*, lapangan olahraga dan sebagainya. Tahun depan, SMTI Yogyakarta akan ditunjuk oleh perusahaan Siemens dari Jerman sebagai *Siemens Training Center* yang merupakan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Keseluruhan fasilitas pendidikan tersebut sangat membantu para siswa dalam meraih prestasi. Ini sesuai dengan semboyan sekolah: “Bersama dalam Berkarya untuk Berjaya”, dengan motto yang disandang “TOP” (Terdepan, Optimal, Proaktif).

Semboyan dan motto tersebut selalu melekat di benak siswa, tak heran para alumni selalu mengenang sekolah ini. “Ikatan alumni dari SMTI Yogyakarta termasuk kuat. Setiap tahun mereka selalu reuni dan kami para guru selalu diundang,” kata Ening tentang para alumni. Salah seorang alumni lulusan tahun 1989, Otok Byantoro, yang saat ini menjabat Direktur Operasional PT. Kwanglim YHI tak sungkan memberi testimoni: “Alhamdulillah, dengan pendidikan tertinggi saya di SMTI Yogyakarta, saat ini saya mampu memimpin dua perusahaan PMA dengan ribuan karyawan. Saya yakin, SMK – SMTI Yogyakarta akan berkembang lebih baik untuk menjawab persaingan global yang semakin berat.”

Sebuah harapan yang tulus, dan kita berharap asa itu selalu menyala.

(EN/SB/Gsn).





Reformasi Birokrasi Belum Optimal

*Oleh: Ali Joto Manalu
Auditor Utama pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin*

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia (SDM). Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang diembannya.

Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi secara bersungguh-

sungguh telah dilakukan beberapa dekade yang lalu. Gelombang pertama dari reformasi birokrasi secara formal dimulai pada tahun 2004 s/d 2009, walaupun sifatnya masih terbatas instansional; dalam arti baru dilakukan oleh beberapa instansi atau lembaga pemerintah tertentu saja. Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini terbatas pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan area perubahan pada aspek kelembagaan (organisasi, budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi dan deregulasi, serta SDM Aparatur.

Gelombang kedua reformasi birokrasi dimulai pada 2010 s/d 2014, dimana pelaksanaannya bersifat nasional, dalam artian seluruh instansi pemerintah – baik pusat maupun daerah – berkewajiban melakukan reformasi birokrasi di instansinya masing-masing. Sasaran yang hendak dicapai pun kian diperluas, yakni terwujudnya pemerintahan yang baik serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sementara area perubahan meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur.

Gelombang kedua dari reformasi birokrasi diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Di samping itu dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) juga menerbitkan Peraturan Menpan & RB Nomor PER/15/M. PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, serta Peraturan Menpan & RB Nomor No: 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019.

Grand Design Reformasi Birokrasi

Dalam Perpres Nomor 81 tahun 2010, dinyatakan bahwa grand design (rancangan induk) dari reformasi birokrasi berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu tahun 2010 s/d 2025. Sedangkan road map reformasi birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design

tersebut yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Saat ini kita tengah berada di gelombang ketiga dari era reformasi birokrasi. Sesuai dengan Peraturan Menpan & RB Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, peta jalan dari reformasi birokrasi gelombang ketiga ini didasarkan pada arah kebijakan pemerintah, yakni Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, dan Isu Strategis/Agenda Prioritas 2015 – 2019. Terkait dengan Nawacita, pelaksanaan reformasi birokrasi mengacu kepada poin kedua dari Nawacita, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Untuk mewujudkan poin tersebut jelas dibutuhkan aparat birokrasi yang berkualitas, berorientasi kepada kepentingan dan pelayanan publik, jujur dan bersih dari praktik KKN.

Selanjutnya yang terkait dengan RPJMN 2015 – 2019. Dalam hal ini agenda pembangunan nasional mencakup lima aspek, yakni: melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional; serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Dari lima agenda pembangunan nasional tersebut, dua di antaranya secara spesifik terkait dengan tata kelola



pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu terkait membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Terkait dengan isu strategis, ada enam agenda prioritas yang dijadikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu: reformasi birokrasi nasional; akuntabilitas kinerja; pengawasan; kelembagaan birokrasi; ketatalaksanaan; dan SDM aparatur. Dilihat dari muatannya, keenam agenda prioritas tersebut mengarah pada perbaikan sistem dan reformasi pelaksanaan birokrasi. Di samping itu, dalam pelaksanaannya telah ditetapkan instansi pembina/pelaksana dari keenam isu tersebut.

Belum Optimal

Dari uraian di atas telah banyak dilakukan oleh lembaga legislatif dan

pemerintah dalam upaya perbaikan reformasi birokrasi, antara lain hasilnya adalah penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyempurnaan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa, telah ditetapkannya Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), proses rekrutmen CPNS melalui test seleksi yang ketat demi memperoleh aparat birokrasi yang berkualitas, dan sebagainya.

Namun hasil-hasil yang telah dicapai tersebut belum sebanding dengan target-target yang diinginkan. Mengutip pendapat Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia Eko Prasodjo yang menyatakan, bahwa reformasi birokrasi masih sebatas perubahan struktural, belum menyentuh persoalan budaya kerja ASN. Padahal, kedua aspek tersebut seharusnya berjalan seiringan dalam proses menciptakan ASN berkualitas dan menjawab kebutuhan zaman (Kompas, 30/11/2018).

Apa yang disampaikan oleh Eko Prasodjo tersebut memang ada benarnya. Contohnya saja, praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi sejak puluhan tahun lalu ternyata masih mewarnai perilaku para aparat birokrasi. Data yang disampaikan oleh Satuan Tugas Sapu Besih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menyebutkan, selama dua tahun terakhir (hingga 15 Oktober 2018), Satgas Saber Pungli berhasil menangkap 12.146 orang yang terlibat pungli dan menyita barang bukti senilai Rp 320,38 miliar. Sementara, pengaduan masyarakat terkait dengan praktik pungli jumlahnya mencapai 36.127 aduan. Pelayanan publik adalah yang paling banyak diadakan terjadinya pungli (52 persen), disusul sektor pendidikan (20 persen), hukum (8 persen), perizinan (5 persen), kepegawaian (5 persen), serta pengadaan barang/jasa (5 persen). Ironisnya, hampir separuh dari kasus tersebut hanya dikenai sanksi administrasi, tidak diproses hukum pidana (Kompas, 24/10/2018).

Di samping praktek pungli, cukup banyak juga oknum ASN yang masih terlibat dalam praktik korupsi dan melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat birokrasi. Yang menyedihkan, bahkan setelah dijatuhkan hukuman melakukan tindak pidana korupsi, namun

mereka tidak diberhentikan sebagai ASN dan masih menerima gaji. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) periode Januari 2015 hingga September 2018, ada 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN) terpidana korupsi baik yang dilakukan sendiri/kelompok ataupun suruhan kepala daerah/pimpinannya dan hingga saat ini belum diberhentikan dan masih menerima gaji.

Dari fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan reformasi birokrasi, namun hasilnya belum optimal sebagaimana diharapkan. Salah satu penyebabnya, dikarenakan budaya kerja yang dilandasi oleh semangat pengabdian dan integritas belum sepenuhnya menjiwai dan dipraktikkan dengan sungguh-sungguh oleh ASN selaku aparat birokrasi pemerintah. Di samping itu, masih banyak pimpinan dari instansi/lembaga atau unit kerja yang belum mampu menjadi contoh teladan bagi aparat bawahannya, malah kadang-kadang justru mereka yang justru melakukan praktik-praktik tidak terpuji tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan rekrutmen pimpinan perlu diciptakan sedemikian rupa untuk terpilihnya pimpinan yang berkompeten dan berintegritas serta menciptakan sistem yang baik dalam melayani.

“

Kesalahan tidak akan menjadi kebenaran walau berulang kali diumumkan, sebaliknya, kebenaran tidak akan jadi kesalahan walau tak seorang pun mengetahuinya.
-Mahatma Gandhi

Teguh Adhi Arianto: Tak Berhenti Berinovasi



Suatu malam, seorang bocah dan kedua orangtuanya melintasi jalanan gelap di daerah Rawamangun, Jakarta. Mereka pulang berobat dari dokter yang berjarak tak jauh dari rumah. Namun langkah mereka berhenti saat sang Bapak memutuskan sesuatu. Sang bapak mengumpulkan patahan-patahan ranting pohon dekat situ, lalu menuju ke tengah jalan. Rupanya ia melihat ada lubang yang cukup dalam. Ranting-ranting ia taruh dengan maksud agar pengendara motor yang lewat tak celaka. Tapi ia sendiri hampir celaka. Sebuah kendaraan, entah mobil atau motor, hampir menabrak sang bapak. Kejadian itu terbawa dalam ingatan bocah lima tahun itu hingga berpuluh tahun kemudian. Hidup harus mudah menolong orang lain.

Lain lagi cerita tentang ibunya. Suatu malam, sang ibu tiba-tiba pergi. Katanya mau menjenguk orang sakit di RSPAD Gatot Subroto. Seorang family-kah? Ternyata bukan. Yang dijenguk adalah seorang transmigran yang tengah berkunjung ke Jakarta untuk menghadiri acara di kantor sang ibu, lalu jatuh sakit. "Apapun, yang ada hubungannya dengan pekerjaan, selalu mendapat perhatian Ibu," kenangnya. "Sering juga Ibu pulang kantor membawa berkas-berkas

pekerjaan, menyelesaikan tugasnya hingga larut malam."

Keseharian pegawai seperti itu terbawa pula dalam ingatan sang bocah. Hingga saat ini banyak orang melihatnya sebagai seorang yang *workaholic*. Bocah dalam kisah di atas, kini menjadi Kepala Bidang Sistem Informasi pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian. Namanya Teguh Adhi Arianto.

Pada tahun 2002, ia mengikuti proses rekrutmen pegawai dan ujian di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Teguh Adhi melamar untuk posisi dosen di STMI Jakarta. Mata kuliah yang diampu saat itu antara lain: *Programming, Data Base* dan penguasaan *Microsoft Office*.

Sebenarnya, 'ujian' demi 'ujian' justru telah ia jalani jauh sebelum itu. Ujian pertamanya diberikan oleh Direktur Bina Program Ditjen Industri Logam Mesin dan Kimia (ILMK) yang ketika itu dijabat oleh Agus Tjahajana. Adhi ditugaskan membuat *data base* agar data ekspor-impor dari *International Trade Centre* (INTRACEN) mudah dilihat sesuai kebutuhan sehingga mudah pula dicetak menjadi buku. "Sebelumnya, perlu waktu

tiga bulan untuk membuat sebuah buku yang memuat statistik itu. Beliau ingin pembuatan buku dapat dilakukan lebih cepat," terang Adhi.

Sebelumnya, Agus Tjahajana memang mencari orang yang mampu membuat sistem data base. Supir Agus Tjahajana menceritakan hal itu pada kawannya yang bernama Yani, kakak Adhi. Jadilah pada hari yang ditentukan, Adhi ikut Yani menghadap Agus Tjahajana. Sejak saat itu, tahun 1996, Adhi bekerja sebagai pegawai honorer dengan jadwal masuk kantor seminggu tiga kali. Kala itu ia bahkan masih berstatus sebagai mahasiswa. Selesai membuat *data base* untuk angka ekspor-impor INTRACEN, Adhi dapat penugasan serupa untuk angka Badan Pusat Statistik (BPS). "Beliau ingin setiap bulan, lima hari setelah data diterima dari BPS, buku sudah keluar." Agus Tjahajana, menurut pengenalan Adhi memang sosok yang senang membuat buku yang berisi segala macam statistik, baik dilihat dari jenis komoditi, negara tujuan, negara asal impor, negara dengan pertumbuhan melonjak, negara dengan penurunan drastis atau parameter apapun yang ada hubungannya dengan produk logam dan kimia.

Penugasan demi penugasan Adhi jalani dengan baik. Tantangan lain adalah saat Agus Tjahajana menjabat sebagai Dirjen Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA). Sebagai pimpinan, Agus ingin punya data base pegawai yang up to date. Kendalanya, jumlah data pegawai banyak, tetapi jumlah petugas input terbatas. Tercetuslah ide untuk membuat sebuah sistem yang data basenya dapat diperbarui oleh pegawai yang bersangkutan. Misalnya, ada pegawai yang baru menyelesaikan Diklat Kepemimpinan, mendapat penugasan ke Luar Negeri, atau mendapat

penghargaan Satyalancana Karya Satya. Data kualifikasi pegawai seperti itu terasa pentingnya saat ada pimpinan atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ingin mengetahui pegawai yang sudah siap dipromosikan untuk jabatan tertentu.

Saat Agus Tjahajana menjabat sebagai Dirjen Industri Kecil dan Menengah, masalahnya lain lagi. Pada masa itu, banyak surat perintah perjalanan dinas (SPD) bantol waktu pelaksanaannya sehingga menjadi 'santapan' para auditor sebagai 'temuan'. Tugas Adhi saat itu adalah membuat sistem agar form SPPD tidak bisa keluar jika tanggal bantol. Form itu merupakan lampiran untuk dokumen pengajuan nominatif ke bendahara. Bendahara tidak mau membayar kalau tidak ada form itu. Supaya tidak diakali, Adhi menambahkan *barcode*. Maka mulailah istilah 'minta *barcode*' menjadi tren di antara pegawai kala itu.

Sementara itu, sistem *data base* pegawai jalan terus. Di mana Agus Tjahajana menjabat, di sana Teguh Adhi membangun sistem *data base* pegawai. Saat Agus Tjahajana menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan (BPPIP), cakupan sistem *data base* ini mulai lebih luas karena adanya unit-unit vertikal. Selain itu, setelah dipromote dalam Rapat Pimpinan dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang ketika itu dijabat oleh Rini Soewandi, Teguh Adhi kemudian diminta berbagai Ditjen lain untuk membangun sistem yang serupa di berbagai Ditjen lainnya.

Saat Agus Tjahajana menjabat Sekjen, sistem *data base* dibuat menjadi satu kesatuan dan berlaku menyeluruh di Kementerian Perindustrian. Kita mengenalnya sekarang sebagai intranet

pada website kemenperin.go.id. Sebagai sebuah sistem data, intranet semakin hari semakin lengkap dengan adanya usulan-usulan para pegawai mengenai fungsi-fungsi dan menunya.

Berkecimpung di dunia pemerintahan, Teguh Adhi mulanya melihat ada sejumlah citra negatif, "Yang pasti kurang efisien, ada beberapa pekerjaan yang perlu banyak orang, padahal dengan teknologi bisa dilakukan oleh lebih sedikit orang. Ada juga pekerjaan yang perlu waktu satu jam atau dua jam untuk selesai, padahal bisa lebih cepat." Namun hal itu ia pandang justru sebagai ruang inovasi.

Sejak sekitar tahun 2000, Adhi bercita-cita perizinan dapat dilakukan secara *online*. Ia melihat mengurus izin impor kendaraan bermotor misalnya, memerlukan kedatangan pihak yang mengajukan, bahkan memerlukan *hard copy* dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Ia melihat, jika saja pengurusan izin bisa dilakukan dari jarak jauh menggunakan jaringan internet, maka akan sangat efisien bagi pihak swasta. Biaya transportasi dan tenaga dapat dipangkas signifikan. Namun pada masa itu belum ada payung hukum yang mendefinisikan, mengakui dan melindungi adanya sistem elektronik di layanan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi salah satu tonggak penting. Instansi pemerintah mulai mempertimbangkan adanya layanan elektronik. Sebut saja Bea Cukai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang

telah bisa diajukan dan dilacak secara online, serta Kementerian Hukum & HAM dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)-nya. "Kita sudah bisa melihat keinginan dunia usaha yang ingin cepat, *online*, simple, terbuka. Alhamdulillah, teman-teman di sini tidak keberatan, malah ingin (memberikan layanan dengan sistem elektronik). Maka lahirlah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian.

Apakah dengan serba cepat dan *online* seperti saat ini, pemerintah dapat dikatakan tunai tugasnya? Menurut Adhi, "Belum. Kita sudah bisa membuat SPPD cepat, *e-monitoring* cepat, rekap cepat, tapi hanya itu saja." Sementara saat ini sedang marak dibahas tentang industri yang bergerak menuju industri 4.0, tapi bagaimana dengan Kemenperin? Bagaimana agar tuntutan peningkatan produktivitas tidak hanya kepada pihak swasta, tetapi juga di lingkungan Kemenperin?

"Saya belum melihat sistem kita dapat meningkatkan produktivitas. Produktivitas PNS tidak sama dengan di pabrik. Bagaimana Kemenperin dapat meningkatkan produktivitas, itu yang perlu kita pikirkan saat ini," pungkas Teguh.

Tak berhenti bermain di ruang inovasi, bahkan pemikirannya pun selalu melayang jauh. Begitulah sosok Teguh Adhi Arianto.

(Trinanti Sulamit)

Sehabis Membaca Koran

Oleh : Edwardsyah Nurdin

Sehabis membaca koran
kita tertegun
sejenak. Lalu kembali rutin
pada sibuk keseharian

Semua telah jadi biasa
dalam eksemplar merata

Sehabis membaca koran
Sehabis membaca halaman pertama
(tentang perang dan kematian)
kita pun membalik iklan

Sajak Kamar Mandi

Oleh : Edwardsyah Nurdin

Tiap kali telanjang dan menyentuh air
Kau jua yang terlontar
dari igauku
Diam-diam aku malu
pada cermin di air itu

Dengan tubuh telanjang begini
mataku ada di setiap sudut, mencatat
malu-ku. Tiap kali telanjang kulihat
bayang-bayang dingin ingin tahu
nyelinap lewat pori

Di kamar mandi: Kau dan aku
mengintai tahu



PT. Sanken Argadwija:

Dari TKDN Sampai Siap Memasuki Era Industri 4.0

Produk-produk Sanken murni produk dalam negeri dengan local content mencapai 90-an persen. Bahkan mampu menjadi market leader di kategori dispenser. Sejauh mana persiapannya menghadapi era industri 4.0?

Masyarakat Indonesia kini makin mencintai produksi dalam negeri. Langkah ini mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing pelaku usaha di Indonesia mampu menguasai pasar domestik serta internasional. Demikian pernyataan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, se usai melepas peserta jalan sehat dengan tema 100% Cinta Produk Indonesia di Jakarta, awal Februari tahun lalu.

Adalah PT Sanken Argadwija, merupakan produsen elektronik yang berdiri sejak tahun 1995 ini terus berinovasi menciptakan peralatan modern dengan meningkatkan penggunaan komponen lokal, sehingga meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menurut Marketing Director Produsen Elektronik Sanken, Ir. Teddy Tjan, Sanken merupakan produk lokal berkualitas Jepang.

Line product Sanken, kata Teddy, mencakup hampir seluruh kategori produk elektronik. Sebut saja *brown goods*, *white goods* (*home appliances*), *small appliances* sampai *solar water heater*. Produk yang terakhir ini ke depan akan menjadi tren, seiring dengan kebijakan energi nasional untuk meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan, diantara *energy mix* berbasis fosil. Pasalnya, tren energi dunia mulai mengurangi penggunaan energi fosil karena menimbulkan efek rumah kaca.

Diakui Teddy, manajemen Sanken sangat agresif di lini *home appliances*. Ambil contoh, di kategori kulkas. Sejak awal produk ini di-develop, konstruksinya diciptakan hemat energi. Untuk menciptakan kulkas hemat energi, instalasi dinding kulkas harus tebal. Konstruksi demikian yang menyebabkan hemat energi bagi produk-produk kulkas Sanken. Teknologi yang digunakan adalah *high density insulation*, yang dengan menggunakan insulasi "*polyurethane*" yang lebih tebal pada dinding kulkas. Dengan menggunakan teknologi ini, maka suhu dingin di dalam kulkas tidak keluar.

Fokus pada Produk Home Appliance

Sementara sejak awal berdiri, Sanken tetap akan fokus di kategori produk-produk *home appliances*. Di lini ini, yang menonjol adalah mesin cuci, dispenser standing dan kulkas. Sementara di kategori *small appliances*, ada *rice cooker* dan kipas angin. "Sanken kuat di produk-produk *home appliances* karena seluruh proses produksi dilakukan di pabrik milik sendiri," urainya serius.

Sanken sangat kosen meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Sampai saat ini, TKDN beberapa produk Sanken, seperti mesin cuci, dispenser, lemari es sudah di atas 90%. "Jadi, untuk elektronik *home appliances*, bukan teknologi yang mutakhir," katanya kepada Redaksi SOLUSI, November lalu.

Walaupun sampai saat ini belum ada peraturan yang mengukur komposisi penggunaan kandungan lokal, tapi Sanken konsisten meningkatkan kandungan lokal dari waktu ke waktu. Ada kesadaran untuk meningkatkan potensi lokal, sehingga menimbulkan *multiplier effect* yang cukup signifikan bagi industri-industri kecil yang terkait lainnya.

Teddy menambahkan, dengan rencana pemerintah memasuki era Industri 4.0, Sanken pun jauh hari mengantisipasi. Contohnya, dispenser yang diproduksi Sanken mulai mengimplementasikan teknologi digital. "Bila air dalam gallon sudah mau habis, dispenser akan memberi sinyal ke *smartphone* bahwa air gallon sudah mau habis," tambah Teddy serius.

Lebih lanjut ditambahkan, dispenser dua galon (*Duo Gallon Technology*) ini pertama di dunia. Ini suatu kebanggaan bagi Indonesia bahwa produk ini diakui oleh dunia menjadi inovasi atau karya terbaik anak bangsa yang sudah dipatenkan oleh para teknisi Indonesia, walau dibantu oleh tim dari Jepang.

Sanken memiliki rentang produk dispenser yang beragam, lebih dari 20 item. Dari dispenser yang masuk segmen *small appliances*, sampai dispenser yang menyasar kelas menengah atas. Dari yang model sederhana sampai yang *body*-nya berbahan kaca. Ditambah lagi dengan teknologi baru duo gallon, ada juga Izzi Gallon (*Bottom Loading*) dengan posisi gallon di bagian bawah dispenser. "Jadi dispenser yang gallonnya mulai kosong, tak perlu susah-susah mengangkat galon berisi air yang berat, tapi tinggal pasang dari bagian bawah dispenser," jelasnya.

Sejauh ini cengkaman pasar yang dikuasai Sanken cukup besar, terutama di kategori dispenser yang saat ini pangsa pasarnya mencapai 40%. Saat ini penetrasi dispenser standing lebih sukses dibandingkan dispenser Sanken yang masuk *small appliances* dengan komposisi dispenser *standing* 70% , sementara dispenser *small appliances* komposisi produksinya 30%.



Yang terpenting adalah higienis. Dalam hal ini Sanken memakai 100% tank *stainless steel* dengan teknologi pengelasan dari luar tanki dan tanpa bahan kimia, pipa QYA yang anti jamur dan tangki yang terbuat dari *stainless steel*, konsep *Compact DuraTank* untuk tanki air panas dan dingin, yang menjaga suhu air tetap stabil dan hemat listrik hingga 30%.

Sedangkan di kategori mesin cuci Sanken mampu meraih pangsa pasar sekitar 15%. Di kategori ini boleh jadi Sanken bertengger di peringkat lima besar. Sanken merupakan "pemain lama" di kategori ini. Bahkan, Sanken menjadi pionir untuk beberapa kategori produk dan merupakan pabrik pertama di Indonesia yang memproduksi mesin cuci. Sampai sekarang, di kategori ini Sanken cukup kuat di pasar. Tiap tahun Sanken meluncurkan tipe mesin cuci terbaru dengan garansi tujuh tahun.

Ada dua kategori mesin cuci, yaitu satu tabung dan dua tabung. Namun demikian, kategori mesin cuci dua tabung masih dominan. Sedikitnya 65% sumbangan penjualan mesin cuci Sanken dua tabung, sedangkan satu tabung berkontribusi 35%.

Sanken memberikan perhatian pada kualitas dan efisiensi produk agar dapat diterima oleh konsumen. Untuk itu, pihaknya mengontrol lini produksi agar tetap stabil dan mampu menghasilkan mesin cuci sesuai yang diharapkan.

Sedangkan di kategori kulkas, Sanken, masih dianggap sebagai pendatang baru. Namun demikian, di lini ini sudah mampu menembus pangsa pasar 5%. Target tahun depan mudah-mudahan pangsa pasar bisa meningkat 10 sampai 20 persen.

Sementara sejak awal rancang bangun pabrik Sanken diciptakan, memang sudah dirancang untuk memproduksi produk-produk elektronik hemat energi. Misalnya tiga tahun lalu, manajemen menggelontorkan belanja modal sekitar Rp 100 milyar untuk membangun pabrik kulkas dan dispenser dua galon dan kulkas dengan konstruksi hemat energi.

Sementara, menurut Direktur PT Sanken Argadwija, Eric H. Tirtajasa, ketika di awal memproduksi, jauh-jauh hari tim *research and development* sudah memikirkannya. Sedikitnya diperlukan waktu lima tahun untuk melakukan riset sampai bisa produksi. Demikian pula halnya dengan kategori kulkas Sanken. "Kami sudah membahasnya 5-6 tahun lalu dan baru terealisasi mulai produksi tiga tahun ini," papar Eric tentang perencanaan produksi kulkas Sanken yang memakan investasi sekitar Rp 50 miliar.

Sedangkan di kategori *brown goods*, Sanken fokus di produk LED TV, speaker dan DVD. Yang unik ditandai di kategori ini, televisi Sanken sudah *build in* dengan

DVR (*Digital Video Recorder*). Artinya sudah dapat langsung menangkap siaran tv digital tanpa harus menambah perangkat (*Standalone DVR*) yang dibutuhkan atau menggunakan antena parabola dengan menggunakan *receiver*. "Memang harga TV Sanken sedikit lebih mahal karena sudah dilengkapi dengan teknologi DVR," jelasnya sambil menambahkan, untuk kategori televisi *plus DVR* ini Sanken menjadi pionirnya.

Siap Menyambut Industri 4.0

Teddy menambahkan, Sanken sangat siap menghadapi revolusi industri 4.0. Saat ini Sanken sedang menginovasi *rice cooker* sudah terkoneksi dengan jaringan internet menggunakan wifi. "Masukkan saja beras dan air, kemudian kita bisa mengatur kapan harus memasak bila kita berada di luar rumah. Cukup menggunakan *smarphon* yang terhubung dengan internet, kita bisa mengaktifkan *rice cooker* itu, sehingga kita pulang ke rumah nasi sudah masak," katanya lagi.

Sementara adanya kekhawatiran masyarakat akan mengurangi tenaga kerja dengan diberlakukannya era



industri 4.0, Teddy mengakui akan terjadi secara alami terhadap proses penggunaan tenaga kerja. Kondisi demikian sudah terjadi sejak zaman industrialisasi di era-era sebelumnya.

“Di elektronik memang ada beberapa tenaga kerja yang akan terpengkas. Misalnya, sebelum menggunakan conveyer belt, produk-produk yang akan diproduksi diangkat secara manual dari satu proses produk ke proses produksi lainnya, sekarang semua proses produksi menggunakan conveyer belt dari satu tahap ke tahap lainnya,” katanya. Proses perubahan teknologi ini saja sudah memangkas tenaga kerja.

Yang dibutuhkan ke depan adalah tenaga-tenaga ahli yang mempunyai kompetensi dibidang IT, misalnya. Tenaga-tenaga kerja tersebut berubah dengan perjalanan waktu. Dulu di era pertanian tradisional, semua dilakukan secara manual. Tapi setelah ditemukan teknologi traktor, misalnya, petani menggunakan traktor untuk me-

ningkatkan produktivitas lahan. “Tetap saja petani bekerja, Cuma perlu ada peningkatan *skill*,” tambahnya.

Teddy meyakini anak-anak mellenial sekarang akan beradaptasi dengan sendirinya atas kehadiran teknologi. Kecuali tenaga-tenaga kerja yang sudah berumur, agak sulit beradaptasi dengan budaya teknologi terbaru tersebut. “Anak-anak sekarang eksplorasinya lebih cepat. Memang zamannya berubah,” tandasnya lagi.

Mungkin yang diperlukan, kata Teddy, regulasi pemerintah dalam melihat perubahan ini. Artinya gap terhadap calon tenaga kerja yang baru lulus, khususnya dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah harus disiapkan untuk masuk dunia industri. “Sanken juga melakukan kerjasama dengan dunia pendidikan. Di Sanken ada ajang pemagangan bagi anak-anak SMK,” ujarnya. Bahkan kini *basic knowledge* dari SMK saat ini sudah mulai memadai.

(EN/YT).



Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Mengucapkan

Selamat Hari Natal
25 Desember 2018

&

Selamat Tahun Baru
2019



Pada hari Kamis, 15 November 2018, bertempat di Ruang Garuda Kemenperin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melantik Irjen (Pol) Drs. Setyo Wasisto, SH sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian. Sebelumnya, Setyo menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri.

Menurut Airlangga, pengisian jabatan eselon I atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya itu telah melalui proses seleksi terbuka. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.



Bertempat di ruang pertemuan Inspektorat Jenderal Kemenperin, 19 November lalu, telah dilaksanakan serah terima jabatan beberapa pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal. Ir. Arus Gunawan menjabat sebagai Inspektur I menggantikan Drs. Dadi Mahardi, MM yang dialih tugaskan sebagai Kepala Biro Umum. Ir. Arus Gunawan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Wilayah Industri I, Ditjen PPI. Inspektur II diisi oleh Ir. Achmad Rodjih Almanshoer yang beberapa waktu kosong karena pejabat sebelumnya, Drs. Edy Waspan, MM beralih tugas sebagai Pejabat Fungsional Auditor (Auditor Utama). Ir. Achmad Rodjih Almanshoer sebelumnya menjabat sebagai Direktur Industri Elektronika dan Telematika. Sementara jabatan yang ditinggalkan Ir. Achmad Rodjih Almanshoer tersebut diisi oleh Ir. R. Janu Suryanto, ME yang meninggalkan jabatan lamanya selaku Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemenperin..

GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI



Untuk Kejayaan Indonesia



MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI
WUJUD CINTA BAGI IBU PERTIWI